

**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU UTARA**



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021





KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara ini disusun dalam rangka menampung perubahan dan dinamika pendidikan di Luwu Utara pada saat ini dan yang akan datang. Penyusunan Renstra ini berupaya seobjektif mungkin menggali dan memaparkan berbagai potensi dan masalah pendidikan, serta tantangan pendidikan nasional dan global, serta disusun melalui berbagai tahapan mulai dari wawancara mendalam, diskusi kelompok, konsultasi dan koordinasi bersama *stakeholder* pendidikan, pemangku kepentingan pendidikan serta partisipasi pejabat dan staf dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.

Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menggunakan seluruh potensi dan sumberdaya untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi yang telah ditetapkan serta mengarahkan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Renstra ini mengacu pada visi RPJMD 2016 – 2021, Visi dan Misi Bupati / Wakil Bupati terpilih serta Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019, serta menjadi dasar dan pedoman bagi semua pejabat dan staf dalam lingkup Dinas Pendidikan dan menjadi acuan dalam penyusunan Renja, Lakip dan Laporan Lainnya.

Dinas Pendidikan mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dengan memberikan masukan dan saran dalam penyusunan Renstra ini.

Masamba, 23 September 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Luwu Utara

Drs. JASRUM, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19631231 199703 1 023



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud Dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penyusunan Renstra.....	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN.....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pendidikan	8
2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan	13
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan	18
2.4 Tantangan Dan Peluang Pelayanan Dinas Pendidikan.....	29
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	34
3.2 Telaahan Visi Dan Misi Bupati Terpilih.....	40
3.3 Telaah Renstra Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan	47



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	52
3.5 Isu-Isu Strategis	54
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	57
4.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan	57
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	60
4.3 Strategi dan Arah Kebijakan	65
BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	68
BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	71
BAB VII. PENUTUP	78



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Penduduk Usia Sekolah.....	14
Tabel 2.2	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	14
Tabel 2.3	Data Pegawai Struktural Berdasarkan Eselon.....	14
Tabel 2.4	Data Pegawai Struktural Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	15
Tabel 2.5	Data Pegawai Berdasarkan Golongan.....	15
Tabel 2.6	Data Pegawai Fungsional Berdasarkan Penugasan/ Fungsi.....	16
Tabel 2.7	Data Pegawai Fungsional Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	16
Tabel 2.8	Data Siswa Perkecamatan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015.....	17
Tabel 2.9	Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pendidikan.....	18
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Hasil Pelayanan Dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir (2011-2015).....	19
Tabel 2.11	Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara 5 Tahun Terakhir (2011-2015).....	27
Tabel 2.12	Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015.....	28
Tabel 3.1	Faktor penghambat & pendorong pelayanan SKPD (Dinas Pendidikan) terhadap Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.....	44
Tabel 3.2	Faktor Penghambat & Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Terhadap Sasaran Jangkah Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.....	48
Tabel 3.3	Faktor Penghambat & Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Terhadap Sasaran Jangkah Menengah Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan.....	50



Tabel 4.1	Rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja masing-masing sasaran.....	64
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan.....	66
Tabel 5.1	Target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2016-2021.....	70
Tabel 5.2	Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.....	73



DAFTAR GAMBAR

Gbr. 1.1	Alur Fikir Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan.....	6
Gbr. 2.1	Struktur Organisasi Pendidikan Kabupaten Luwu.....	13
Gbr. 2.2	Keterkaitan Mutu Pendidikan Dan Pembangunan Ekonomi.....	32



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, dalam Undang - Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola dan pencitraan publik untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Lebih lanjut sehubungan dengan telah disahkannya RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara sebagai salah satu SKPD harus menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan. Ketentuan setiap SKPD harus membuat Renstra tercantum dalam Pasal 151 Undang-Undang



Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra dimaksud memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategi merupakan langkah awal yang harus dilakukan dan mampu menjawab tuntutan di lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Strategi memuat kebijakan, program dan kegiatan. Selain Inpres tersebut di atas, ketentuan mengenai tatacara penyusunan Rencana Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang merupakan pedoman teknis yang wajib diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun Renstra SKPD.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Pendidikan ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.



1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 didasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



(RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Penyusunan Rencana Strategis

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 Bab III Bagian Kesatu Pasal 3 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.

b. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 sebagai landasan/pedoman penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan penganggarannya, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, dan merupakan dasar



evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.

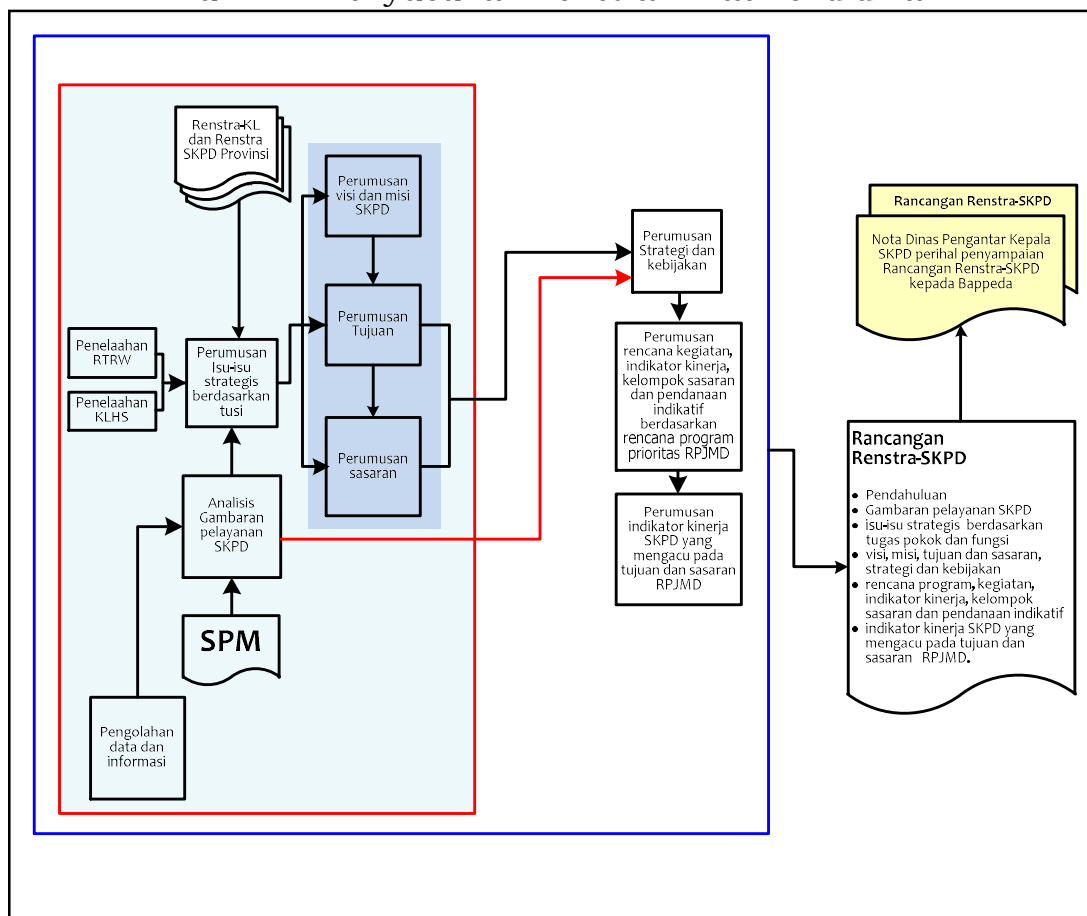
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan *stakeholders* Dinas Pendidikan dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renstra.

Penyusunan Renstra ini dimulai dengan inventarisasi rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja di tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021. Legalisasi Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.

Alur pikir penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 1.1
Alur Fikir Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan



Sedangkan sistematika penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bagian ini memuat hal-hal yang fundamental dalam penyusunan rencana strategis meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.

BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD

Bagian ini memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Kinerja Pelayanan serta tantangan dan peluang pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.



BAB III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Bagian ini memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kemdikbud dan Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.

BAB IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Dan Kebijakan

Bagian ini memuat tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.

BAB V : Rencana Program Dan Kegiatan

Bagian ini memuat tentang Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara

BAB VI : Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD.

Bagian ini memuat uraian tentang indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII : Penutup.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

Dalam menyelenggarakan tugas kelembagaan, Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara mempunyai tugas pokok dibidang pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Dan Tata Kerja Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan. Adapun penjabaran dari Tugas Pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan.
- b. Fungsi Kepala Dinas:
 - 1) Perumus Kebijakan dinas;
 - 2) Penyusunan rencana strategis dinas;
 - 3) Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pendidikan;
 - 4) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan dinas;
 - 5) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas; dan
 - 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

Adapun tugas pokok dan fungsi sekretaris dan masing-masing bidang adalah sebagai berikut:



2. Sekretariat Dinas

a. Tugas Pokok Sekretaris Dinas adalah merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan.

b. Fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga;
- 2) Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
- 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan sub bagian;
- 4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

3. Bidang Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal

a. Tugas Pokok Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal adalah merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang anak usia dini, non formal dan informal.

b. Fungsi

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang;
- 2) Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
- 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
- 4) Pembinaan dan penyelenggaraan kurikulum pendidikan anak usia dini, non formal dan informal;
- 5) Pembinaan dan penyelenggaraan ketenagaan pendidikan anak usia dini, non formal dan informal;



- 6) Pembinaan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, non formal dan informal; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan

4. Bidang Pendidikan Dasar

- a. Tugas pokok Bidang Pendidikan Dasar adalah merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dasar.
- b. Fungsi:
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang;
 - 2) Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
 - 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
 - 4) Pembinaan dan penyelenggaraan kurikulum sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - 5) Pembinaan dan penyelenggaraan ketenagaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - 6) Pembinaan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

5. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan

- a. Tugas Pokok Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan adalah merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pendidikan menengah dan kejuruan.
- b. Fungsi:
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang;
 - 2) Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;



- 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
- 4) Pembinaan dan penyelenggaraan kurikulum sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan;
- 5) Pembinaan dan penyelenggaraan ketenagaan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan;
- 6) Pembinaan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan;
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala bidang, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, dan 9 (sembilan) orang Kepala Seksi. Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan,
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, yang terdiri atas:
 - a. Seksi Pendidikan Pra Sekolah dan Non Formal,
 - b. Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Guru dan Kependidikan,
 - c. Seksi Pembinaan Kursus dan UKS.

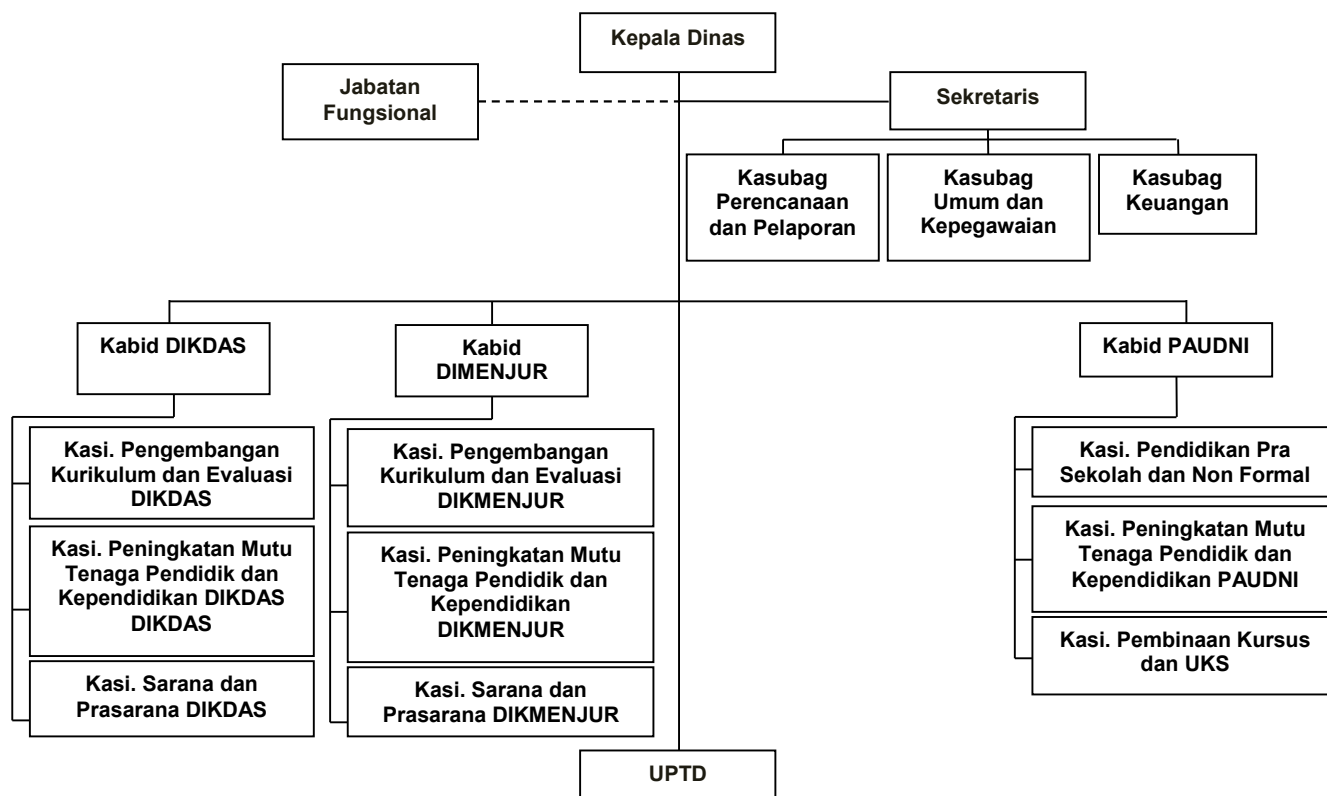


4. Bidang Pendidikan Dasar, yang terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Dasar,
 - b. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar,
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
5. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan, yang terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Menengah dan Kejuruan,
 - b. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Kejuruan,
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dan Kejuruan.
6. Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)



Secara lengkap struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara disajikan sebagai berikut

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan
Kabupaten Luwu Utara



2.2 SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN

1. Data Non Kependidikan

Jumlah penduduk usia sekolah Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2015 sebanyak 94,782 jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan. Dari jumlah tersebut penduduk 4-6 tahun sebanyak 18.198 jiwa, penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 37.643 jiwa, penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 18.019 jiwa dan penduduk usia 16-18 tahun sebanyak 20.922 jiwa. Dari uraian ini dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:



Tabel 2.1
Data Penduduk Usia Sekolah

No.	Wilayah	4-6	7-12	13-15	16-18
1	SABBANG	2,346	4,873	2,309	2,625
2	BAEBUNTA	2,945	6,086	2,958	3,487
3	MALANGKE	1,706	3,830	1,836	1,951
4	MALANGKE BARAT	1,661	3,422	1,526	1,579
5	SUKAMAJU	2,388	5,006	2,443	2,903
6	BONE-BONE	1,653	3,323	1,575	1,874
7	TANA LILI	1,452	3,070	1,466	1,637
8	MASAMBA	2,206	4,200	2,067	2,693
9	MAPPEDECENG	1,251	2,757	1,408	1,656
10	RAMPI	246	427	184	249
11	RONGKONG	344	649	247	268
12	SEKO	1,039	1,830	746	919
Jumlah		18,198	37,643	18,019	20,922

2. Data Kependidikan

a. Kondisi Umum Pegawai Struktural

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi pegawai Struktural pada Dinas Pendidikan:

Tabel 2.2
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	PEGAWAI	JUMLAH	%
1	Struktural	107	61,85
2	Fungsional	66	38,15
JUMLAH		173	100

Tabel 2.3
Data Pegawai Struktural Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH	%
1	Eselon II	1	0,93
2	Eselon III	4	3,74
3	Eselon IV	12	11,21
4	Staf	90	84,11
JUMLAH		107	100



Tabel 2.4
Data Pegawai Struktural Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Strata 2	11	10,28
2	Strata 1 / diploma IV	62	57,94
3	Diploma 3	4	3,74
4	Diploma 2	-	0
5	Diploma 1	-	0
6	SLTA	28	26,17
7	SLTP	2	1,87
8	SD	-	0
JUMLAH		107	100

Tabel 2.5
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	Golongan IV	10	9,35
2	Golongan III	54	50,47
3	Golongan II	10	9,35
4	Golongan I	2	1,87
5	Non PNS	31	28,97
JUMLAH		107	100

Dari tabel-tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara adalah sebanyak 107 orang.

Data pegawai struktural yang berjumlah 107 orang di atas, terdiri terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 orang, pejabat eselon III sebanyak 4 orang, pejabat eselon IV sebanyak 12 orang dan staf sebanyak 90 orang. Pegawai struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari lulusan strata dua (S2) sebanyak 11 orang, lulusan strata satu/diploma empat (S1/D4) sebanyak 62 orang, lulusan diploma tiga (D3)



sebanyak 4 orang, lulusan SLTA sebanyak 28 orang, lulusan SMP sebanyak 2 orang.

Jumlah pegawai struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara berdasarkan golongan terdiri dari Non PNS sebanyak 31 orang, golongan IV sebanyak 10 orang, golongan III sebanyak 54 orang, golongan II sebanyak 10 Orang, dan golongan I sebanyak 2 orang.

b. Kondisi Umum Pegawai Fungsional

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi pegawai fungsional Dinas Pendidikan:

Tabel 2.6
Data Pegawai Fungsional Berdasarkan Penugasan/Fungsi

NO	URAIAN	JUMLAH	%
1	Guru/ kepala sekolah	5222	98,75
2	Pengawas	66	1,25
JUMLAH		5288	100

Tabel 2.7
Data Pegawai Fungsional Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Guru Berdasarkan Status Dan Pendidikan Terakhir						
Guru/Kepala Sekolah						
PNS		Non PNS		Total		
≥S1	< S1	≥S1	< S1	≥S1	< S1	≥S1 + <S1
2.203	421	1.554	1.044	3.757	1.465	5.222
2.624		2.598				
Pengawas						
66		-		66	-	66

Untuk jumlah pegawai fungsional berdasarkan penugasan berjumlah 5288 orang yang terdiri dari guru dan kepala sekolah sebanyak 5222 orang yang tersebar di tingkat satuan pendidikan yaitu tingkat PAUD, SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN, dan pengawas berjumlah 66 orang terdiri dari pengawas TK/SD dan pengawas Mata Pelajaran.



Sedangkan pegawai fungsional Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara berdasarkan jenjang pendidikan di dasarkan kepada Undang Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU No.14/2005) adalah yang berijazah Sarjana atau Diploma IV dan yang lebih tinggi maka dibagi menjadi dua yaitu lulusan $\geq S1$ sebanyak 3.757 orang guru dan 66 orang pengawas dan lulusan $\leq S1$ sebanyak 1.465 orang guru.

c. Kondisi Jumlah Siswa

Tabel 2.8
Jumlah Siswa Perkecamatan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015

KECAMATAN	PAUD/RA			SD			SMP			SMA			SMK		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
BAEBUNTA	269	263	532	2960	2702	5662	1170	1153	2646	718	1077	1795	20	31	51
BONE-BONE	225	224	449	1412	1300	2712	901	832	2311	423	635	1058	416	624	1040
RONGKONG	0	0	0	345	296	641	193	177	362	70	105	175	0	0	0
MALANGKE	136	144	280	1517	1370	2887	506	566	1954	247	371	618	152	229	381
MALANGKE BARAT	236	238	474	1288	1256	2544	433	478	1431	323	484	807	55	82	137
MAPPEDECENG	187	210	397	1211	1088	2299	538	470	1157	236	354	590	411	617	1028
MASAMBA	401	413	814	2195	2018	4213	1137	1219	2906	846	1269	2115	55	82	137
RAMPI	41	47	88	242	217	459	149	126	255	68	102	170	0	0	0
SABBANG	169	199	368	2412	2286	4698	1049	988	2332	366	549	915	86	128	214
SEKO	26	24	50	1063	958	2021	458	510	957	157	236	393	0	0	0
SUKAMAJU	502	464	966	2499	2288	4787	896	953	2334	543	815	1358	127	190	317
TANALILI	166	137	303	1514	1333	2847	386	390	874	69	104	173	84	125	209
GRAND TOTAL	2358	2363	4721	18658	17122	35770	7816	7862	15678	4067	6100	10167	1406	2108	3514



d. Kondisi Umum Sarana Kerja

Tabel 2.9
Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pendidikan

URAIAN		BANYAKNYA	SATUAN
A. SARANA GEDUNG			
2	Gedung Kantor Disdik	1	Unit
3	Gedung UPTD	12	Unit
4	Gedung TK	11	Unit
5	Gedung SD	245	Unit
6	Gedung SMP	71	Unit
7	GEDUNG SMA	19	Unit
8	GEDUNG SMK	12	Unit
9	GEDUNG SLB	3	Unit
B. SARANA ANGKUTAN			
1	Kendaraan roda empat	2	Unit
2	Kendaraan roda dua	14	Unit
C. SARANA PERKANTORAN LAINNYA			
1	Komputer PC	20	Unit
2	Laptop/Book Note	7	Unit
3	Infocus	4	Unit
4	Kamera	3	Unit
D. SARANA PENUNJANG LAINNYA			
1	Server Dapodik	1	Unit

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan agenda perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi serta daya saing pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut:



Tabel 2.10
Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir
Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja sesuai tupoksi	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT															
1	Angka melek huruf (Keseluruhan penduduk)	92,50	92,75	93,10	93,57	93,86	92,50	92,96	87,81	95,27	95,55	100,00	100,23	94,32	101,82	101,80
2	Angka rata-rata lama sekolah	7,15	7,28	7,55	7,70	7,87	7,46	7,49	7,86	7,96	7,98	104,34	102,88	104,11	103,38	101,40
3	Angka partisipasi kasar															
	Angka partisipasi kasar (APK) Usia 4-6 Tahun	60,32	60,37	60,37	70,42	70,42	22,42	20,30	30,97	25,41	25,94	37,17	33,62	51,31	36,09	36,84
	Angka partisipasi kasar (APK) Usia 7-12 Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	103,74	106,69	84,93	109,80	89,30	103,74	106,69	84,93	109,80	89,30
	Angka partisipasi kasar (APK) Usia 13-15 Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,63	90,21	100,43	111,38	82,60	90,63	90,21	100,43	111,38	82,60
	Angka partisipasi kasar (APK) Usia 16-18 Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	87,70	91,81	90,28	73,84	80,82	87,70	91,81	90,28	73,84	80,82
4	Angka pendidikan yang ditamatkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI	-	-	-	-	-	5,81	6,32	8,19	15,36	17,48	-	-	-	-	-
	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	-	-	-	-	-	6,48	6,30	8,21	6,23	8,17	-	-	-	-	-
	Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA	-	-	-	-	-	4,39	4,28	5,50	4,71	5,93	-	-	-	-	-
5	Angka Partisipasi Murni															
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	75,20	75,30	75,40	75,50	75,60	88,11	91,69	76,47	85,97	76,32	117,17	121,77	101,42	113,87	100,95
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	71,69	72,19	72,69	73,19	73,69	66,96	69,75	69,81	62,98	56,20	93,40	96,62	96,04	86,05	76,27
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	38,35	44,40	55,50	66,99	70,00	56,29	61,44	60,62	65,11	80,03	146,78	138,38	109,23	97,19	114,33



	ASPEK PELAYANAN UMUM															
	Pendidikan Dasar:															
1	Angka partisipasi sekolah															
	Angka partisipasi sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun	97,82	98,32	98,82	99,32	99,82	97,99	98,01	97,06	108,43	87,65	100,17	99,68	98,22	109,17	87,81
	Angka partisipasi sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun	85,66	87,68	89,70	91,72	93,74	86,51	86,12	74,86	80,47	89,09	100,99	98,22	83,46	87,73	95,04
2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah															
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia 7-12 Tahun	1:146	1:159	1:171	1:182	1:192	1:159	1:160	1:175	1:135	1:138	106,31	100,46	101,73	80,58	78,57
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia 13-15 Tahun	1:254	1:273	1:291	1:308	1:324	1:195	1:183	1:201	1:161	1:165	81,21	72,97	74,36	60,05	58,59
3	Rasio guru/murid															
	Rasio guru/murid SD/MI	27,57	26,35	25,10	24,15	23,35	25,14	2,68	1:13	1:13	1:12	91,19	10,17	0,20	0,21	0,21
	Rasio guru/murid SMP/MTs	17,32	16,09	15,82	14,20	13,40	35,00	6,19	1:11	1:12	1:14	202,08	38,47	0,31	0,35	0,38
	Rasio guru PNS/murid SD/MI	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:24	1:25	1:28	1:28	1:25	91,30	92,39	95,65	95,65	92,39
	Rasio guru PNS/murid SMP/MTs	1:26	1:26	1:26	1:26	1:26	1:22	1:24	1:26	1:27	1:25	95,35	97,67	100,00	101,16	98,84
4	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,07	0,10	0,09	0,11	0,02	70,00	100,00	93,27	109,18	20,46
	Pendidikan menengah:															
5	Angka partisipasi sekolah	57,52	63,08	74,50	85,55	89,00	59,17	62,14	63,93	76,27	83,33	102,87	98,51	85,81	89,15	93,63
6	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	1:342	1:366	1:389	1:411	1:432	1:347	1:373	1:375	1:442	1:465	101,24	101,64	96,88	106,58	106,71
7	Rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA	11,08	10,30	9,15	8,25	7,45	3,70	3,70	1:17	1:18	1:18	33,39	35,92	0,58	0,66	0,73
8	Rasio guru PNS/murid SMA/SMK/MA	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36	1:31	1:30	1:30	1:29	1:28	94,79	93,75	93,75	92,71	91,67
9	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	98,23	98,37	98,52	98,69	98,85	80,05	80,54	83,01	92,48	94,18	81,49	81,87	84,26	93,71	95,28
	Fasilitas Pendidikan:															



10	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	75,00	77,02	78,00	81,00	85,00	75,08	73,20	72,15	69,64	68,04	100,11	95,04	92,50	85,98	80,05
11	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	84,73	82,35	81,18	81,89	87,70	99,68	94,66	91,21	89,99	94,30
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):															
12	Angka Partispasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	40,12	60,37	78,49	85,32	95,68	22,65	23,40	18,72	37,55	44,12	56,46	38,76	23,85	44,01	46,11
	Angka Putus Sekolah:															
13	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,04	0,06	0,09	0,11	0,11	80,00	150,00	300,00	550,00	1100,00
14	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,10	0,08	0,06	0,05	0,03	0,12	0,11	0,21	0,16	0,03	120,00	137,50	350,00	320,00	100,00
15	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,10	0,08	0,06	0,05	0,03	0,10	0,10	0,10	0,09	0,08	100,00	125,00	166,67	180,00	266,67
	Angka Kelulusan:															
16	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,88	99,88	100,00	100,00	99,27	99,88	99,88	100,00	100,00	99,27
19	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	89,47	93,15	95,41	97,60	98,45	96,00	95,28	93,28	118,33	76,42	107,30	102,29	97,77	121,24	77,62
20	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	90,17	91,52	93,29	94,80	95,61	87,55	87,14	87,95	62,33	81,41	97,09	95,21	94,28	65,75	85,15
21	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	69,54	73,29	80,53	95,28	98,45	55,00	56,20	45,82	60,60	71,95	79,09	76,68	56,90	63,60	73,08
	STANDAR PELAYANAN MINIMAL															
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-



2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru. serta papan tulis.	-	-	-	-	-	-	-	19,44	26,53	81,22	-	-	-	-	-
									26,53	-	94,37	-	-	-	-	-
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 siswa dan minimal 1 (satu) set peralatan praltek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.							-	57,38	-	8,45					
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP dan MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.							-	-	-	23,67	20,41				
								-	-	-	22,06	49,30				
5	Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.							-	-	-	31,84	77,14				
6	Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.							-	-	-	38,24	21,13				



7	Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.						-	-	-	61,22	83,27					
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik. untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.						-	-	-	86,76	98,59					
9	Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika. IPA. Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.						-	-	-	13,24	18,31					
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.						-	-	-	70,20	79,59					
11	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP dan MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.						-	-	-	86,76	88,73					
12	Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.						-	-	-	-	47,95					



13	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.						-	-	-	100,00	100,00					
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.						-	-	-	83,67	81,63					
							-	-	-	73,53	67,61					
	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)															
1	Proporsi Murid Kelas 1 yang berhasil menamatkan SD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,96	99,94	99,91	99,89	99,89	99,96	99,94	99,91	99,89	99,89
2	Angka melek huruf penduduk Usia 15-24 Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rasio Perempuan terhadap laki-laki di tingkat Pendidikan Dasar	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:0,93	1:1,09	1:1,13	1:1,06	1:1,09	1,66	1,67	1,67	1,67	1,67
		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1,90	1:0,96	1:0,97	1:0,91	1:1,02	1,69	1,67	1,67	1,66	1,67
	TARGET INDIKATOR LAINNYA															
1	Rasio Ketersediaan RKB dan Murid SD	1:28	1:28	1:28	1:28	1:28	1:21	1:21	1:19	1:24	1:20	92,05	92,05	89,77	95,45	90,91
2	Rasio Ketersediaan RKB dan Murid SMP	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:29	1:28	1:29	1:31	1:25	96,74	95,65	96,74	98,91	92,39
3	Rasio Ketersediaan RKB dan Murid SMA	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:39	1:39	1:40	1:39	1:37	107,61	107,61	108,70	107,61	105,43
4	Rasio Ketersediaan RKB dan Rombongan Belajar SD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	94,82	94,82	89,98	97,06	97,42	94,82	94,82	89,98	97,06	97,42
5	Rasio Ketersediaan RKB dan Rombongan Belajar SMP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,85	99,85	91,22	101,59	106,73	99,85	99,85	91,22	101,59	106,73
6	Rasio Ketersediaan RKB dan Rombongan Belajar SMA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	84,09	84,09	85	86,32	80,95	84,09	84,09	85,00	86,32	80,95



Jika kita perhatikan tabel di atas, capaian indikator *outcome* hampir seluruhnya mencapai 100% atau sesuai dengan target renstra, kecuali satu indikator yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APK) TK. Hal ini dikarenakan sumber penghitungan dua indikator tersebut dari instansi lain (BPS dan Bappeda). Adapun untuk indikator yang lainnya, realisasi indikatornya sudah hampir mencapai target hanya perlu lebih ditingkatkan untuk beberapa indikator agar dapat mencapai 100%. Sementara pada tahun-tahun selanjutnya, realisasi renstra terbagi dalam dua kategori, yaitu yang melebihi target dan yang tidak sesuai target, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di atas.

Untuk indikator pelayanan pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada fokus kesejahteraan, terdapat delapan indikator sebagai alat ukurnya, yaitu: (1) Angka Melek Huruf (AMH); (2) Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS); (3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI; (4) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs; (5) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK; (6) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI; (7) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs; (8) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK. Dari 8 (delapan) indikator tersebut ada beberapa indikator yang realisasi nilainya mengalami fluktuatif dari tahun 2011-2015, Angka Melek Huruf (AMH) misalnya, dari target 92,50%; 92,75%; 93,10%; 93,57%; 93,86% teralisasi 92,50%; 92,96%; 87,81%; 95,27%; 95,55%. Dengan demikian dalam kurun lima tahun, indikator tersebut ada peningkatan, yaitu sekitar 3,05%. Peningkatan ini kemungkinan besar disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat tentang implementasi pendidikan menengah universal (PMU) atau wajib belajar 12 tahun, yang dibarengi dengan adanya pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang dikmen.

Pada indikator yang kenaikannya belum mencapai target, terlihat pada APK SMP/MTs. Hal ini disebabkan antara lain oleh



faktor peningkatan jumlah penduduk usia 13-15 tahun lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tersebut yang masuk ke jenjang SMP/ sederajat.

Kondisi yang hampir sama dalam realisasi selama lima tahun pun terjadi pada realisasi keuangan, baik pada aspek pemerataan dan perluasan akses maupun pada aspek pelayanan mutu dan relevansi pendidikan juga aspek yang lainnya.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pembiayaan untuk pembangunan pendidikan melalui Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara disusun dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan Kementerian yang terkait dengan pendidikan.

Dalam kurun waktu 2011-2015, pembiayaan untuk pembangunan pendidikan ini dilaksanakan dengan fungsi (1) memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin dan/atau masyarakat kurang mampu, (2) memperkuat otonomi pendidikan di satuan pendidikan dengan pemberian bantuan subsidi / insentif untuk meningkatkan layanan ketersediaan, keterjangkauan dan mutu pendidikan serta (3) pemberdayaan untuk peningkatan pengelolaan manajemen pendidikan.

Dari jumlah dana tersebut diatas pada akhir Desember 2015, telah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan melalui berbagai laporan kinerja sebesar Rp. 371.175.967.509,- atau 97,06%. Skenario pengeluaran anggaran periode 2011-2015, terurai dalam tabel di bawah ini:



Tabel 2.11
Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara 5 tahun terakhir
(2011-2015)

Tahun	Belanja Disdik	Belanja Tidak Langsung (BTL)	Belanja Langsung (BL)	Realisasi Belanja Disdik	Realisasi Belanja Tidak Langsung	Realisasi Belanja Langsung
2011	267,633,737,880	155,157,457,880	112,476,280,000	240,176,406,188	154,632,062,984	85,544,343,204
2012	270,172,661,400	182,472,099,000	87,700,562,400	266,456,384,729	181,702,417,621	84,753,967,108
2013	259,915,872,224	198,845,585,970	61,070,286,254	251,310,392,276	191,746,679,576	59,563,712,700
2014	332,245,644,632	231,437,953,340	100,807,691,292	307,523,558,385	217,785,996,527	89,737,561,858
2015	382.426.182.879	253.603.333.000	128.822.849.879	371.175.967.509	238.401.585.195	132.774.382.314

Dilihat dari tabel di atas, dari tahun ke tahun anggaran Dinas Pendidikan terlihat fluktuatif atau. Pada tahun 2011 sebesar Rp. 267.633.737.880 dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar Rp. 270.172.661.400. Selanjutnya pada tahun 2013 anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara mengalami penurunan menjadi Rp. 259,915,872,224 dan pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 332,245,644,632, dan pada tahun terakhir renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara mengalami peningkatan menjadi Rp. 382.426.182.879, adanya kenaikan dan penurunan anggaran disetiap tahunnya didasarkan pada APBD Kabupaten, namun diharapkan dari hal tersebut tidak mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Luwu Utara sehingga dapat berkontribusi positif pada upaya pencapaian setiap sasaran yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.

Selanjutnya untuk menggambarkan lebih mendalam realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara selama periode 2011-2015 maka berikut ini kami sajikan realisasi anggaran per-program:



Tabel 2.12
Pagu Anggaran Dan Realisasi Keuangan Per Program
Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 s.d 2016

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN TAHUN (*)					REALISASI ANGGARAN TAHUN (*)					CAPAIAN				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	161.350.000	748.103.800	708.100.000	1.045.290.000	2.413.665.579	161.224.850	724.428.100	692.271.875	1.030.757.000	2.279.251.085	99,92%	96,84%	97,76%	98,61%	94,43%
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	29.901.180.800	18.401.368.300	16.262.798.340	49.249.430.360	92.518.790.800	29.661.767.878	18.385.164.300	15.986.459.725	49.150.337.450	92.411.218.862	99,20%	99,91%	98,30%	99,80%	99,88%
3	Program Pendidikan Menengah	505.642.500	6.944.810.600	8.229.209.110	20.269.603.300	32.785.503.280	458.458.700	6.856.351.674	8.185.322.100	19.069.545.915	32.785.503.280	90,67%	98,73%	99,47%	94,08%	100,00%
4	Program Pendidikan Nonformal	51.200.000	294.270.000	403.500.000	438.890.000	363.300.000	34.825.000	290.463.350	395.958.500	438.556.200	362.410.000	68,02%	98,71%	98,13%	99,92%	99,76%
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	863.535.000	415.682.000	521.320.000	501.780.000	660.050.000	854.592.000	408.997.000	519.532.675	470.682.900	634.150.850	98,96%	98,39%	99,66%	93,80%	96,08%
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	916.965.500	296.025.000	496.581.840	662.898.840	488.837.000	862.163.400	293.943.000	484.274.000	648.099.825	484.610.000	94,02%	99,30%	97,52%	97,77%	99,14%



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

1. Tantangan

Berbagai kajian dan analisis terhadap berbagai permasalahan dalam pembangunan pendidikan menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk melakukan pembenahan melalui perencanaan dengan pendekatan *Partisipatif* dan *Bottom Up* dengan tetap memperhatikan pendekatan *Politik* dan pendekatan *Teknokratis*.

Pembangunan pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal menyangkut kondisi sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan politik yang terjadi saat ini. Kondisi sosial, budaya dan lingkungan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Luwu Utara dalam posisi yang makin penting dalam percaturan global. Dampak dari pertumbuhan ini pada seluruh kehidupan manusia, mulai dari masalah kelangsungan hidup, pangan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, dan pendidikan, menuntut untuk memberikan layanan yang memadai sebagaimana amanat undang-undang terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat.

Faktor lain adalah masih tingginya kesenjangan antar gender, antara penduduk kaya dan miskin, antara perkotaan dan perdesaan, antara wilayah maju dan wilayah tertinggal, yang kesemuanya mempengaruhi pembangunan pendidikan. Oleh karena itu perlu didukung dengan penyiapan tenaga kerja yang terampil dan memadai dengan memiliki *hard skills* yang seimbang dengan *soft skills*. Begitu pula kondisi teknologi yang terutama kesenjangan literasi TIK antar wilayah menuntut kebutuhan akan penguasaan dan penerapan IPTEK dalam rangka menghadapi tuntutan global.



Kondisi politik, terutama yang ketidakselarasan peraturan perundangan yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan, masing – masing pemerintah (pusat dan daerah) dengan kewenangan masing – masing membuat aturan, kebijakan dan program yang tidak terkoordinasi sehingga dampaknya program pembangunan pendidikan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk mempercepat regulasi atau penerbitan turunan peraturan/perundangan agar terwujud kesamaan gerak dan langkah dalam pengembangan layanan pendidikan.

Dari uraian di atas, maka tantangan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah:

- a. Memenuhi komitmen global terhadap rumusan MDGs, EFA dan EfSD untuk memenuhi hak anak yakni mendapatkan pendidikan secara adil utamanya menyelesaikan pendidikan di jenjang pendidikan dasar minimal tamat. Oleh karena itu perlu mencapai sasaran/indikator secara maksimal seperti yang ditetapkan dalam komitmen tersebut.
- b. Menjamin keberpihakan pada masyarakat miskin untuk memperoleh dan meningkatkan pendidikan yang bermutu sepanjang hayat pada semua jenis, jenjang dan satuan pendidikan sebagai bagian dari hak dasar masyarakat terhadap pendidikan.
- c. Menghasilkan SDM yang kreatif melalui pembelajaran yang bermakna yaitu keseimbangan *hard skills* dan *soft skills* disertai dukungan sarana informasi telekomunikasi dengan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan terutama pada jalur pendidikan kejuruan/vokasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional yang dapat menunjang penciptaan ekonomi kreatif.



- e. Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan *stakeholder* pendidikan untuk mencapai gerak dan langkah yang sama membangun program prioritas pendidikan yang sinergi dengan tuntutan zaman.
- f. Memberikan pemahaman yang *holistik* mengenai urgensi pendidikan kepada masyarakat di daerah tertinggal dengan menggunakan pendekatan antropologi sosial melalui basis budaya dan kearifan lokal.

2. Peluang

- a. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, ditegaskan bahwa pembangunan ekonomi diarahkan kepada peningkatan daya saing dan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*). Ini menunjukkan bahwa pendidikan diharapkan meraih keunggulan dalam persaingan. Ketersediaan sumber daya manusia bermutu yang menguasai iptek sangat menentukan kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi global yang menuntut daya saing tinggi. Kuncinya adalah pengembangan *Knowledge Based Economy* (KBE) yang mensyaratkan dukungan manusia berkualitas. Oleh karena itu *Education for the Knowledge Economy* (EKE) mutlak dibutuhkan diberbagai lembaga pendidikan, dimana lembaga pendidikan tersebut akan berfungsi sebagai dasar pengembangan produk-produk, juga sebagai pusat penelitian riset unggulan yang mendukung KBE.

Gambar 2.2
Keterkaitan Mutu Pendidikan Dan Pembangunan Ekonomi



- b. Prestasi peserta didik di Kabupaten Luwu Utara tidak kalah bersaing dengan peserta didik di kabupaten lain yang ada di Sulawesi Selatan bahkan kabupaten di seluruh Indonesia, turut mengharumkan dan membanggakan Luwu Utara dengan memperoleh medali (emas, perak, dan perunggu), patut mendapatkan pembinaan secara berkelanjutan mengingat banyaknya tawaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan.
- c. Integrasi ekonomi antar wilayah dimana Luwu Utara berposisi sangat strategis dalam akselerasi perekonomian koridor Sulawesi Selatan, perlu diakselerasi dengan dukungan infrastruktur dalam memperkuat konektivitas yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (*locally integrated, globally connected*). Oleh karena itu Lembaga Pendidikan dan Lembaga Litbang Pendidikan dituntut lebih berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas SDM dan Iptek guna mempercepat proses inovasi teknologi di wilayah Luwu Utara, sebagai tuntutan dari pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- d. Desentralisasi pendidikan yang dicetuskan sejak perberlakuan Undang-Undang No: 22 Tahun 1999 tentang



Pemerintahan Otonomi Daerah, menjadi keharusan untuk dilaksanakan. Tiga urgensi dalam desentralisasi pendidikan yaitu (1) pembangunan masyarakat demokrasi (2) pengembangan *Social Capital* dan (3) peningkatan daya saing bangsa, cukup dijadikan alasan mengapa desentralisasi pendidikan perlu dilakukan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus menumbuhkan komitmen peningkatan pemberdayaan dengan pendekatan *School Based Management* (Manajemen Berbasis Sekolah) dengan melibatkan pemangku kepentingan melalui tugas dan fungsi masing – masing.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas kelembagaan, Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara mempunyai tugas pokok dibidang pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 Bab III Bagian Kesatu Pasal 3 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. Adapun Tugas Pokok yang dimaksud adalah melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pendidikan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dengan tugas pokok dan fungsi yang berfokus kepada penyusunan kebijakan teknis, pelayanan dan pembinaan di bidang pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah atas dan kejuruan serta pendidikan nonfomal dan informal, mengalami beberapa permasalahan di bidang pendidikan, akibat imbas dan dampak dari:

- A. Pertumbuhan penduduk yang bergerak secara cepat sehingga berimplikasi pada daya dukung alam yang lambat laun tidak mencukupi, padahal sumber daya alam mineral tidak bertambah, sedangkan sumberdaya hayati dan nabati dapat diberdayakan namun tetap akan 'mengganggu' keseimbangan ekosistem. Pendidikan dinilai tidak memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggungjawab sosial dan *natural* terutama sinergi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Hal ini juga merupakan salah satu faktor penyebab sehingga nilai APK SMP/MTs tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara.



- B. Budaya dan karakter bangsa terutama yang menyangkut korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massa, kehidupan ekonomi yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, menjadi topik/pembahasan yang hangat di media, sehingga dunia pendidikan menjadi sorotan yang tidak mampu memberikan pemecahan *alternatif*.
- C. Perekonomian global abad 21 dikendalikan oleh jaringan teknologi informasi, di mana semua transaksi dilakukan secara online, investasi dan pasar modal dilakukan tanpa melihat gejolak kehidupan nyata, kecuali dengan cara melihat angka-angka di monitor. Dunia pendidikan dinilai terlambat mengantisipasi pengenalan dan pembelajaran Teknologi Informasi sehingga lulusan dan angkatan kerja yang memasuki dunia kerja harus mengorbankan waktu dan biaya untuk mengikuti pelatihan melalui kursus dan pendidikan tambahan.

Memperhatikan faktor yang mempengaruhi kewenangan SKPD (Dinas Pendidikan) baik internal maupun eksternal serta kajian – kajian yang berkaitan dengan pelayanan SKPD dan kajian lainnya, diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut:

A. Bidang/Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1. Melek Huruf.

Masih ada masyarakat penyandang buta aksara yang sudah terlalu tua sehingga kemampuan menyerap ilmu lebih lambat, belum lagi yang menderita gangguan penglihatan karena usia mereka yang sudah tidak muda lagi. (1) belum sinkron persepsi dalam menetapkan komponen variabel dalam menghitung AMH seperti usia lanjut 60 tahun keatas masih dimasukan komponen perhitungan walaupun disisi lain ada yang membatasi hanya usia produktif saja yaitu 15 –60 tahun, dan yang



paling penting adalah (2) kurangnya fokus alokasi anggaran serta dukungan dari Kab/Kota untuk kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran (buta aksara/buta huruf).

2. Rata Lama Sekolah.

Ketidaktercapaian target rata lama sekolah di tahun 2015 disebabkan beberapa faktor antara lain (1) rendahnya akses usia sekolah mendapatkan pendidikan karena faktor biaya yang dinilai cukup tinggi untuk bersekolah dan atau melanjutkan pendidikan terutama didaerah terpencil, terpencar dan terluar. (2) Kesadaran para orang tua menilai bahwa pendidikan hanya memerlukan biaya tinggi dan tidak dapat memberikan kontribusi yang penunjang kehidupan dalam waktu dekat, sehingga lebih memanfaatkan tenaga anak mereka membantu mencari nafkah atau pendapatan seperti menjadi buruh, petani atau pekerjaan yang cepat mendapatkan penghasilan, dan (3) kontribusi bantuan pendanaan untuk pendidikan bagi anak *marginal* belum merata dan lebih banyak digunakan untuk operasional sekolah.

3. Pemerataan Kesempatan Belajar

Pemerataan kesempatan belajar yang diukur dari pencapaian Angka Partisipasi, baik APK (angka partisipasi kasar) maupun APM (angka partisipasi murni) merupakan perhitungan untuk mengetahui seberapa jauh penduduk usia sekolah menikmati atau menjalani pendidikan di satuan pendidikan tertentu dalam suatu wilayah. Pada tahun 2015, khususnya untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), APK dalam RPJMD periode 2011 -2015 ditetapkan 70,42% namun hanya direalisasi 25,94% Ketidaktercapaian APK PAUD ini disebabkan (1) belum



meratanya kelembagaan PAUD disemua Kecamatan dan Desa, umumnya keberadaan PAUD hanya lebih banyak di Ibu Kota Kabupaten atau tempat pemukiman yang banyak penduduk, sehingga penduduk dari beberapa kecamatan dan desa yang belum mempunyai kelembagaan PAUD sulit mengakses karena faktor jarak yang memerlukan waktu dan biaya, (2) Pandangan beberapa orang tua lebih cenderung anak mereka langsung di sekolahkan di SD karena di lembaga PAUD memerlukan biaya yang cukup tinggi. APM untuk SD pada tahun 2015 ditargetkan sudah mencapai 75,60%, dan pada tahun yang sama, sudah terealisasi 76,32%. Namun demikian angka realisasi ini masih rendah mengingat kriteria APM idealnya 98.00% (Depdikbud 2005, materi pelatihan tenaga perencana) atau APM tidak boleh melampaui angka 100%. Penyebab APM untuk tingkat SD tidak memenuhi target disebabkan banyaknya penduduk diluar usia sekolah untuk SD (< 7 tahun) atau belum sampai usia 7 tahun sudah disekolahkan di tingkat SD. Oleh karena itu APK untuk tingkat SD sudah hampir mencapai 100% yaitu 89,30%. Rendahnya pemerataan kesempatan belajar (*equity*) disertai banyaknya peserta didik yang putus sekolah, serta banyaknya lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi selain faktor biaya dan yang paling berpengaruh adalah factor geografis dimana sebagai wilayah/daerah termasuk daerah 3T. Dengan demikian permasalahan pokoknya adalah bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga Negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan.



4. Kelanjutan Pendidikan

Kelanjutan pendidikan (*survival rate*) yang diukur dari Angka Pendidikan yang ditamatkan baik laki – maupun perempuan menunjukkan penurunan. Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP pada tahun 2015 baru mencapai angka 76,42% dari target 100%, begitupun juga AM dari SMP Ke SMA/SMK baru mencapai angka 81,41%. Kondisi tersebut disebabkan karena ada sebagian siswa yang melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi namun berada diluar Kabupaten Luwu Utara dan/atau ada juga siswa yang melanjutkan sekolahnya di sekolah agama yang mempunyai basis data berbeda sehingga sulit untuk didata. Hal lain yang menyebabkan masalah ini karena *mindset* dari orang tua yaitu terkait dengan penghasilan *instan*. Maksudnya, ada beberapa orang tua siswa yang tidak membiarkan anaknya untuk lanjut sekolah dan lebih memilih untuk mempekerjakan anaknya tersebut karena menurut mereka hal itu lebih bermanfaat karena dapat menghasilkan uang pada saat itu juga. Maka dari itu dinas Pendidikan dalam hal ini harus lebih paham bagaimana memanfaatkan media baik elektronik, cetak, maupun ceramah dan diskusi untuk memperluas promosi dan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan serta bagaimana pembinaan kesiswaan ditingkatkan dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kecakapan siswa melalui Program Bea Siswa.



B. Bidang/Fokus Urusan Wajib

1. Ketersediaan Sekolah bagi Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sekolah bagi penduduk usia sekolah menunjukkan rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah sekolah tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan tertentu. Selama periode 2011-2015 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI dan SMP/MTs cenderung menurun setiap tahun. Pada tahun 2011 rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah untuk sekolah dasar (SD) adalah sebesar 1:159 kemudian pada tahun 2015 menjadi 1:138, sedangkan untuk SMP rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah untuk tahun adalah sebesar 1:195 kemudian untuk tahun 2015 menjadi 1:165. Selanjutnya untuk SMA/MA/SMK, pada tahun 2011 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk 1:347 orang, dan pada tahun 2015 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah sebesar 1:465 orang. Ini menunjukkan bahwa belum meratanya sebaran jumlah sekolah pada daerah-daerah tertentu utamanya daerah terpencil, terpencar dan terluar. Pokok permasalahan adalah bagaimana mendorong daerah dalam menyediakan lahan dalam upaya memperluas daya tampung.

2. Perbandingan jumlah guru terhadap siswa

Perbandingan ini mengukur jumlah guru terhadap jumlah siswa atau rasio guru terhadap siswa. Pengukuran ini untuk melihat berapa jumlah siswa yang dapat diajar atau difasilitasi oleh seorang guru. Dari pengamatan yang dilakukan ditemukan bahwa belum optimalnya pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola pembelajaran. ini terlihat pada penyebarannya



yang belum merata sehingga terjadinya kesenjangan rasio guru terhadap siswa utamanya antara daerah perkotaan dan daerah pedalaman.

Selain itu, formasi kebutuhan untuk daerah terpencil, terpencar dan terluar kurang diminati oleh calon pendidik serta pola pemerataan yang belum memperhitungkan kualifikasi dan kompetensi pendidik. Pokok permasalahan terhadap pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah upaya apa yang perlu disinergikan terhadap kewenangan pemerintah pusat, Kabupaten dan Kab/Kota.

3.2 Telaahan Visi dan Misi Bupati Terpilih

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu-isu strategis pembangunan yang dihadapi pada periode 2016-2021, arahan dari RPJMD Luwu Utara, serta arahan dari visi RPJMN 2015-2019, maka Bupati dan Wakil Bupati terpilih menetapkan Visi “Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal“. Dalam rumusan tersebut terdapat tiga pokok Visi yakni (1) Luwu Utara yang religius, (2) Pembangunan yang Berkualitas dan Merata serta (3) Berlandaskan Kearifan Lokal“. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **“Luwu Utara yang religius”**, dapat dimaknakan sebagai masyarakat yang sangat memegang teguh, menjunjung tinggi, tunduk dan patuh pada nilai-nilai agama. Dengan terwujudnya masyarakat yang religius, diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara.
2. **“Pembangunan berkualitas dan merata”**, dapat diartikan sebagai tekad yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik dari waktu ke waktu, pelayanan publik yang sanggup menjangkau seluruh warga,



dan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah kecamatan.

3. **“Berlandaskan kearifan lokal”**, lebih dimaksudkan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan dan kearifan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

Dari rumusan Visi diatas maka Bupati dan Wakil Bupati terpilih menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya.

Misi ini mengaitkan tiga pilar Kabupaten Luwu Utara masyarakat, pemerintah dan lembaga adat yang akan didorong perubahannya menuju arah yang lebih baik. Upaya perubahan tersebut menuju masyarakat yang lebih religius, tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta komunitas adat dan berdaya. Misi ini mengandung tiga upaya utama yakni mendorong pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat, mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendorong keberdayaan komunitas adat.

2. Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni.

Misi ini mengaitkan dua masalah utama yang dihadapi masyarakat Kabupaten Luwu Utara yakni derajat kesehatan masyarakat yang rendah dan masih terbatasnya pemenuhan rumah layak huni serta pemukiman bersanitasi baik. Dengan demikian misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, mendorong pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat, mendorong pemenuhan rumah layak huni, serta mendorong kesejahteraan keluarga.



3. Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya.

Misi ini mengaitkan dimensi pendidikan, aktivitas kepemudaan dan revitalisasi kebudayaan sebagai elemen penting bagi kemajuan Kabupaten Luwu Utara. Misi ini mengandung upaya utama dalam hal meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, mengembangkan sistem inovasi daerah dan kreativitas masyarakat, membina kegiatan kepemudaan dan olah raga, serta membina kebudayaan daerah.

4. Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata.

Misi ini mengaitkan tiga aspek dalam kemajuan perekonomian daerah Kabupaten Luwu Utara yakni mendorong kemandirian dalam mengelola sumberdaya perekonomian di satu sisi dan mengembangkan iklim investasi di sisi lain sambil memprioritaskan pengembangan pariwisata untuk semakin menggairahkan perekonomian tersebut. Misi ini mencakup upaya umum meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, usaha kecil dan menengah, serta jasa dan industri, mengembangkan iklim investasi dan meningkatkan daya tarik pariwisata.

5. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup

Misi ini terfokus pada keberlanjutan pembangunan secara ekologis, dimana Kabupaten Luwu Utara memiliki kerentanan yang signifikan dihubungkan dengan masalah lingkungan. Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara kualitas lingkungan hidup, mendorong kebersihan dan keindahan lingkungan perkotaan dan perdesaan, serta mengendalikan dampak lingkungan dari berbagai aktivitas pembangunan.

6. Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah



Misi ini mengaitkan masalah ketimpangan pendapatan dalam masyarakat, ketimpangan kemajuan antar wilayah/kecamatan dan jangkauan infrastruktur wilayah. Jangkauan infrastruktur wilayah menjadi persoalan krusial mengingat masih adanya kecamatan yang belum terjangkau kendaraan roda empat. Misi ini mencakup upaya umum dalam menanggulangi kemiskinan, menekan pengangguran terbuka, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi, perhubungan, dan sumberdaya air.

7. Mewujudkan ketertiban umum, keamanan yang kondusif dan perlindungan masyarakat.

Misi ini menjawab keterpenuhan kondisi prasyarat bagi pelaksanaan pembangunan yakni ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Tanpa jaminan keamanan dan ketertiban umum maka pembangunan pada berbagai aspek lain sulit berjalan lancar. Misi ini mencakup upaya umum dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan keamanan masyarakat serta pemeliharaan harmoni sosial. Misi ini menjadi lebih urgen karena tatanan masyarakat Kabupaten Luwu Utara terdiri dari etnis yang beragam.

Berdasarkan rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih diatas, bila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD (Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara) maka perlu meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan *stakeholder* pendidikan melalui fasilitasi berupa perumusan kebijakan, pelayanan dan pembinaan agar Visi tersebut terwujud sebagaimana mestinya. Sedangkan faktor penghambat dan pendorong Pelayanan SKPD terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih diuraikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.1
Faktor penghambat & pendorong pelayanan SKPD (Dinas Pendidikan) terhadap Visi, Misi
Dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Visi : Luwu Utara Yang Religius Dengan Pembangunan Berkualitas Dan Merata Yang Berlandaskan Kearifan Lokal				
No	Misi dan Program	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Misi 3 : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.				
Program :				
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, termasuk pembangunan sekolah unggulan dan perguruan tinggi	Sarana dan Prasarana khususnya di daerah 3T belum merata	Terdapat daerah yang 3T, menyulitkan mengadakan bangunan ruang kelas yang sesuai standar dikaitkan dengan anggaran yang tersedia.	Amandemen ke 4; UUD 1945, pasal 34 ayat (2) “ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”
		Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 seluruh satuan pendidikan harus memenuhi 8 standar nasional pendidikan (SNP).	Lokasi pembangunan sekolah Unggulan	Ditetapkannya beberapa Satuan Pendidikan menjadi Sekolah Rujukan, Sekolah Model, Sekolah Imbas dan Sekolah Standar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		Regulasi yang menjadi acuan dalam usulan penganggaran perguruan tinggi	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 34 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), maupun UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah belum mengatur kewenangan kabupaten/kota untuk Pendidikan Tinggi	Pemerintah daerah mendorong pembangunan Perguruan Tinggi melalui fasilitasi melalui penyiapan lahan serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi. Selain itu Pemerintah daerah dapat meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui penyiapan tenaga pendidik dan akreditasi PT.



2	Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Masih adanya guru yang memiliki kompetensi keilmuan dan profesionalitas rendah atau belum memenuhi kualifikasi S1/D4 dan belum memiliki kemampuan dalam bidang IPTEK	1. Faktor personal, berupa rendahnya kesadaran guru untuk mengutamakan mutu dalam pengembangan diri; 2. Faktor ekonomis, berupa terbatasnya kemampuan finansial guru untuk secara berkelanjutan mengembangkan diri	UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen; Permendikbud 28/2010 tentang Tugas Tambahan Guru; Fakta Integritas antara Kepala Sekolah dengan Kepala Dinas Pendidikan tentang Implementasi IT pada pembelajaran di sekolah
3	Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai budaya dalam kehidupan.	Tenaga pendidik bahasa daerah yang masih kurang dan standar isi pembelajaran bahasa daerah yang belum dipahami oleh tenaga pendidik	Kurangnya tenaga pengajar yang memahami secara menyeluruh terkait bahasa daerah dan menyusunnya secara sistematis ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	Penetapan Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal pembelajaran dalam satuan pendidikan
4	Satu Desa Satu PAUD	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang PAUD baru mencapai 24.30	Belum ada regulasi yang mengharuskan siswa baru sekolah dasar memiliki Ijazah/Sertifikat PAUD	Ditetapkannya Permendesa Nomor 1 Tahun 2016 terkait pengelolaan dana desa yang memperbolehkan penganggaran pembiayaan layanan dasar.
5	Sekolah ramah anak mendukung kabupaten layak anak	Belum adanya satuan pendidikan (sekolah) yang memenuhi kriteria sekolah ramah anak	Keterbatasan sarana dan prasarana di satuan pendidikan yang menunjang sekolah ramah anak	UU 23/2002 Pasal 4 tentang Perlindungan Anak; Permendikbud 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan serta Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nomor 6/10/PB/2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah. SK Bupati tentang Penetapan Sekolah Pilot Project Sekolah Ramah Anak



6	Distribusi Guru Proporsional (DGP)	Sebaran Guru PNS di masing-masing satuan pendidikan belum merata dan proporsional, sehingga beberapa guru kesulitan memenuhi jam wajib mengajar 24 jam.	Rasio Guru PNS dan Rombel masih kurang, sehingga kebutuhan guru PNS ditutupi dengan merekrut Guru Non PNS	SKB 5 Menteri Nomor 05/X/PB/2011 tentang Penataan dan Pemetaan Guru Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Distribusi Guru Pegawai Negeri Sipil secara Proporsional serta Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara Nomor 188.4.45/67.a Tanggal 17 Oktober 2012 tentang Petunjuk Teknis DGP
---	------------------------------------	---	---	---



3.3 Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan R.I. No: 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode 2015 – 2019, telah dirumuskan Visi “ Terbentuknya Insan Serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sulawesi Selatan Nomor : 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 maka dengan itu Dinas Pendidikan telah merumuskan Visi “ Terwujudnya Layanan Pendidikan yang Berkualitas dan Terjangkau “. Maka dengan itu Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara mencoba menelaah sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara terhadap Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.2

Faktor Penghambat & Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Terhadap Sasaran
Jangkah Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Visi : Luwu Utara Yang Religius Dengan Pembangunan Berkualitas Dan Merata Yang Berlandaskan Kearifan Lokal				
No	Misi dan Program	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tersedia dan Terjangkau Layanan PAUD berkualitas dengan sasaran APK PAUD nasional mencapai 72%, sekurang-kurangnya 75 % Kabupaten mencapai APK $\geq$ 50%	Kelembagaan PAUD belum terpenuhi untuk setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara.	Faktor lokasi penempatan Kelembagaan sulit diadakan dan dibebaskan dengan pembiayaan yang ada.	1. Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat ayat (1), "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu", dan pada ayat (5) menyatakan "Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 3 ayat (1) "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya".
2	Tersedia dan Terjangkau dan Terjamin Kepastian Memperoleh Layanan DIKDAS berkualitas dengan sasaran :APM nasional mencapai 96%, sekurang – kurangnya 90% Kabupaten mencapai APM $\geq$ 94%; 1. Menyebarnya kelompok usia sekolah 7-12 tahun yang masih ada di SMP bagi usia 12 tahun. 2. APS Kelompok Usia 7 -12 Tahun mencapai 99,90%,	1. Daya Tampung di jenjang pendidikan dasar terbatas. 2. Menyebarnya kelompok usia sekolah 7-12 tahun yang masih ada di SMP bagi usia 12 tahun.	1. Terdapat lokasi 3T, menyulitkan mengadakan bangunan ruang kelas yang sesuai standar dikaitkan dengan anggaran yang tersedia. 2. Pendataan dan pengumpulan data kelompok usia sekolah 7-12 tahun memerlukan waktu yang lama karena menelusuri kelompok usia sekolah di	1. Amandemen ke 4; UUD 1945, pasal 34 ayat (2) " Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya" 2. Permendagri No: 54 Tahun2010, mengamanatkan dilakukan pendataan pendidikan untuk semua jenjang.



	3. APK SMP/MTs/Paket B nasional mencapai 110%, sekurang – kurangnya 90% Kabupaten mencapai APK $\geq$ 90%; 4. Angka Putus Sekolah SD Minimal 0,70% dan SMP maksimal 1%, Angka Melanjutkan SD / MI / Paket A ke SMP/MTs/Paket B mencapai 97%		jenjang yang lebih tinggi dalam satu wilayah tertentu	
3	Tersedia dan Terjangkau Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan dengan sasaran: 1. Rata Lama Sekolah sekurang-kurangnya mencapai 8.25 Tahun; 2. Tingkat Literasi Nasional usia $\geq$15 Tahun mencapai 95.8%	1. Akses Usia Sekolah dalam mendapatkan pendidikan masih rendah; 2. Keterlambatan penuntasan buta aksara dan pencapaian indikator AMH	1. Faktor biaya yang dinilai cukup tinggi untuk bersekolah dan atau melanjutkan pendidikan; 2. Program keberlanjutan setelah melek huruf tidak kontinyu terutama penyediaan Taman Bacaan Masyarakat serta Pelatihan Keterampilan dan bersifat <i>Life Skill</i>	1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten meningkatkan peringkat IPM dalam posisi 10 tertinggi di Indonesia; 2. INPRES No: 5 Tahun 2006 yang menegaskan tentang Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan Buta Huruf.



Tabel 3.3
Faktor Penghambat & Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Terhadap Sasaran
Jangkah Menengah Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan

No	Misi dan Program	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Program :				
1	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan, Sasaran: 1. Meningkatkan kemampuan literasi dan minat baca masyarakat; 2. Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan wajib belajar 12 Tahun.	1. Keterlambatan penuntasan buta aksara dan pencapaian indikator AMH; 2. Akses Usia Sekolah dalam mendapatkan pendidikan masih rendah.	1. Program keberlanjutan setelah melek huruf tidak kontinyu terutama penyediaan Taman Bacaan Masyarakat serta Pelatihan Keterampilan dan bersifat Life Skill; 2. Faktor biaya yang dinilai cukup tinggi untuk bersekolah dan atau melanjutkan pendidikan.	1. INPRES No: 5 Tahun 2006 yang menegaskan tentang Percepatan Penuntasan Wajib Dikdas 9 Tahun dan Buta Huruf; 2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten meningkatkan peringkat IPM dalam posisi 10 tertinggi di Indonesia
2	Memantapkan sistem pembelajaran yang bermutu dengan sasaran: Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik;	Masih banyak guru yang memiliki kompetensi keilmuan dan profesionalitas rendah;	1. Faktor personal, berupa rendahnya kesadaran guru untuk mengutamakan mutu dalam pengembangan diri; 2. Faktor ekonomis, berupa terbatasnya kemampuan finansial guru untuk secara berkelanjutan mengembangkan diri	UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen yang mengharuskan guru memenuhi kualifikasi S1/D4; Permendikbud 28/2010 tentang Tugas Tambahan Guru;
3	Menyediakan sarana prasarana pendidikan dengan sasaran Meningkat jumlah sekolah (satuan pendidikan) yang memenuhi SNP(standar nasional pendidikan)	Masih banyaknya satuan pendidikan (sekolah) yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Faktor internal antara lain peserta didik, tenaga kependidikan, sarpras, ketersediaan dana, pemahaman warga sekolah terhadap keterlaksanaan standar nasional pendidikan dan untuk faktor eksternal disebabkan karena faktor letak geografis	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 seluruh satuan pendidikan harus memenuhi 8 standar nasional pendidikan (SNP).



4	Meningkatkan Pelayanan Manajemen Pendidikan dengan sasaran Meningkatkan jumlah sekolah (satuan pendidikan) yang Terakreditasi.	Masih banyaknya satuan pendidikan (sekolah) yang belum terakreditasi dan ada juga sekolah yang masa berlaku sertifikat akreditasinya telah berakhir.	1. Terjadinya ketidakakuratan data yang diperoleh di lapangan dengan realita pada masing-masing satuan pendidikan; 2. Biaya yang diperlukan dalam proses akreditasi relatif besar, sehingga dirasa sangat memberatkan bagi lembaga pendidikan	Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 60 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 86 & 87 dan Surat Keputusan Mendiknas No. 87/U/2002
---	--	--	--	---



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Stretegis (KLHS).

a. Telaahan RTRW

Tujuan penataan ruang Kabupaten Luwu Utara sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara tahun 2011-2031 adalah "Mewujudkan Kabupaten luwu Utara yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Berbasis Agro dan kelautan dengan memperhatikan Aspek Lingkungan dan Aspek Bencana demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Luwu Utara".

Berdasarkan RTRW tersebut di atas, rencana struktur ruang Kabupaten Luwu Utara meliputi rencana pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya, hal ini dapat terlihat dari (a) Pusat kegiatan lokal (PKL); (b) Pusat pelayanan kawasan (PPK); (c) Pusat pelayanan lingkungan (PPL); (d) Sistem jaringan transportasi darat; (e) Sistem jaringan transportasi laut; (f) Sistem jaringan transportasi udara; (g) Sistem jaringan energi; (h) Sistem jaringan telekomunikasi; (i) Sistem jaringan sumber daya air; dan (j) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

RTRW Kabupaten Luwu Utara jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, upaya peningkatan layanan pendidikan di wilayah-wilayah 3T harus mendapat perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam



dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dengan pemanfaatan teknologi (IPTEK) secara optimal.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

b. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Adapun selanjutnya KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;



5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD Kabupaten dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD Kabupaten yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

3.5 Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan hasil analisis dari semua informasi yang dikembangkan dan dianalisa baik dari pencermatan lingkungan internal dan eksternal, permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, keterkaitan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta keterkaitan dengan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena rumusan isu – isu strategis dalam perencanaan pembangunan pendidikan jangka menengah menjadi perhatian yang harus dikedepankan agar pelaksanaan



pembangunan mencapai hasil yang diharapkan yaitu efektif dan efisien.

Dari uraian di atas, beberapa isu-isu strategis di bidang pendidikan menjadi bahan perumusan untuk menetapkan Visi, Misi Kebijakan dan Progam Dinas Pendidikan kedepan yang antara lain adalah :

1. Persentase Penduduk Tuna Aksara Luwu Utara yang bernilai 3,78% berada di atas persentase Tuna Aksara nasional yang berada pada angka 3,7%. Buta aksara terkait erat dengan kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Kondisi ini harus diatasi guna melepaskan masyarakat dari perangkap kemiskinan.
2. Kesempatan memperoleh pendidikan yang merata dan bermutu belum terjangkau bagi wilayah 3T. Keadaan ini harus diantisipasi untuk mewujudkan komitmen bangsa terhadap rumusan terhadap *Millenium Development Goals (MDG's)*, dan Pendidikan Untuk Semua (*EFA*).
3. *Survival rate* (Kelanjutan pendidikan) bagi lulusan pendidikan dasar dan menengah masih rendah diakibatkan kemampuan orang tua terbatas untuk membiayai putra-putri mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini berdampak pada angka putus sekolah meningkat serta rata lama sekolah yang rendah.
4. Sarana prasarana penunjang untuk pembelajaran teori dan praktek belum terpenuhi sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Selain itu sarana gedung terutama di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah, banyak mengalami kerusakan sehingga proses pembelajaran



belum maksimal sebagaimana tuntutan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Proses Pendidikan.

5. Predikat profesi belum sepenuhnya melekat pada guru bila dilihat dari hasil uji kompetensi guru (UKG), dimana rerata hasil UKG Kabupaten Luwu Utara tahun 2015 dengan nilai 50,07 atau berada pada posisi terendah kedua di Propinsi Sulawesi Selatan (*Sumber: NPD PDSPK*).
6. Sistem distribusi guru yang belum terpadu antara pemangku kebijakan sehingga rasio guru antar wilayah tidak merata. Faktor lain adalah kurangnya minat guru yang akan bertugas didaerah 3T mengakibatkan adanya perbedaan atau *gap* tentang mutu lulusan serta selalu terjadi kekurangan guru.
7. Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap proses pembelajaran masih minim/kurang diberdayakan oleh guru atau sekolah.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI DINAS PENDIDIKAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan *gender*.

Salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan “ Negara wajib menyediakan pelayanan pendidikan bermutu bagi semua warga Negara ”. Oleh karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas serta berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku, dengan menganut prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu :

1. *Demokratis* dan berkeadilan serta tidak *diskriminatif* dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia , nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa;
2. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
3. Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
4. Mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;



5. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Atas pandangan tersebut menjadi landasan dalam perumusan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara pada periode 2016-2021. Selain itu rumusan Visi dan Misi tersebut tetap memperhatikan dan mengacu kepada rumusan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara nomor 11 tahun 2005 tentang pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara, dan rumusan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan Nasional yang termuat dalam Renstra periode 2015-2019, serta hasil telaahan terhadap isu-isu aktual yang berkembang, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menetapkan Visi sebagai berikut: **“Ekosistem Pendidikan yang merata, berkualitas dan berkarakter berlandaskan kearifan lokal”**. Dengan penetapan rumusan Visi tersebut, maka diharapkan penyelenggaraan layanan pendidikan dapat membentuk dan mencetak sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing yang mampu mewujudkan perannya sebagai mahluk sosial yang *adaptif* dan *transformatif* yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam sekitarnya dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal untuk dapat mewujudkan Visi Pemerintah Daerah.

Dalam rumusan tersebut terdapat tiga pokok Visi yakni (1) **Ekosistem Pendidikan**, (2) **Merata, Berkualitas dan Berkarakter** serta (3) **Berlandaskan Kearifan Lokal**. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **“Ekosistem Pendidikan”**, dapat dimaknakan sebagai tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh atau hubungan timbal



balik antar unsur pendidikan (Guru dan Siswa) dan unsur lingkungan (masyarakat) yang saling mempengaruhi.

2. **“Merata, Berkualitas dan Berkarakter”**, dapat diartikan sebagai tekad yang kuat untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang sanggup menjangkau seluruh warga, mempunyai kualitas, bermutu baik serta berakhlak dan berbudi pekerti yang baik.
3. **“Berlandaskan kearifan lokal”**, lebih dimaksudkan sebagai penegasan bahwa pembangunan pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan dan kearifan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

Untuk dapat mewujudkan Visi sebagaimana rumusan di atas, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menetapkan misi sebagai berikut:

1. Misi Pertama: Mewujudkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas.

Menyediakan layanan pendidikan yang merata dan terjangkau dalam misi ini terkandung makna bahwa pelayanan pendidikan dapat diarahkan pada upaya yang dapat menjamin ketersediaan akses pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Utara bagi semua kelompok masyarakat usia sekolah yang dapat dijangkau baik secara ekonomis maupun geografis.

2. Misi Kedua: Mewujudkan pembelajaran yang bermutu dan berkarakter.

Dalam misi ini terkandung makna Dinas Pendidikan bertanggung jawab dalam meningkatkan profesionalisme guru serta meningkatkan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat yang mempunyai karakter yang baik.

3. Misi Ketiga: Mewujudkan penguatan tata kelola layanan pendidikan.



Dalam misi ketiga ini terkandung bahwa makna Dinas Pendidikan mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan profesionalitas, kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dan kelembagaan pendidikan yang mampu menyelenggarakan manajemen serta tata kelola pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun internal yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dalam bahasa Inggris disebut *goal* atau *objektif*. Tujuan adalah hasil yang diinginkan untuk jangka waktu tertentu. Bedanya dengan misi adalah, jika misi berbicara tentang tujuan keberadaan organisasi atau individu, maka tujuan memiliki cakupan lebih kecil dan merupakan bagian dari misi. Apabila misi disebut tugas, maka tujuan adalah tugas-tugas kecil yang merupakan bagian dari misi.

Dari definisi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara pada sektor pendidikan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan adalah berpijak pada rumusan visi dan misi yang sudah ditetapkan untuk lima tahun mendatang, juga berdasarkan pada hasil pengkajian pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Dengan kata lain, tujuan Dinas Pendidikan mengarahkan pada perumusan strategi, program, dan kegiatan dalam rangka merumuskan tujuan makro yang dikemas dalam rumusan visi dan misi di atas. Berdasarkan visi ke tiga RPJMD Kabupaten Luwu Utara yakni Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya serta tujuan ke lima Meningkatkan derajat pendidikan dan kemampuan literasi masyarakat maka Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara akan merumuskan tujuannya dengan menggunakan salah satu pertimbangannya antara lain adalah sumber daya yang di miliki



serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut.

Adapun rumusan tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara periode tahun 2016-2021 yang sesuai dengan rumusan misi di atas adalah:

1. Misi Pertama: Mewujudkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Adapun tujuannya adalah:

Meningkatkan akses dan mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan disemua jenjang Satuan Pendidikan.

2. Misi Kedua: Mewujudkan pembelajaran yang bermutu dan berkarakter. Adapun Tujuannya adalah:

a. Meningkatkan profesionalisme dan distribusi guru & tenaga kependidikan;

b. Meningkatkan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat.

3. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Layanan Pendidikan. Adapun Tujuannya adalah:

Meningkatkan Mutu Manajemen Layanan Pendidikan.

Selanjutnya Sasaran Dinas Pendidikan dirumuskan berdasarkan tujuan dari masing-masing misi yang sudah dirumuskan. Adapun definisi sasaran itu sendiri adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Ada dua pendekatan utama yang dapat digunakan lembaga untuk mencapai sasarannya. Pendekatan pertama disebut pendekatan tradisional. Pada pendekatan ini, pimpinan tertinggi memberikan sasaran-sasaran umum, yang kemudian diturunkan oleh bawahannya menjadi sub-tujuan (*subgoals*) yang lebih terperinci. Bawahannya itu kemudian menurunkannya lagi kepada anak buahnya, dan terus hingga mencapai tingkat paling bawah. Pendekatan kedua disebut dengan *management by objective* atau MBO. Pada



pendekatan ini, sasaran dan tujuan organisasi tidak ditentukan oleh pimpinan puncak saja, tetapi juga oleh bawahan. Pimpinan dan bawahan bersama-sama membuat sasaran-sasaran yang ingin mereka capai. Dengan begini, seluruh karyawan akan merasa dihargai sehingga produktivitas mereka akan meningkat.

Terkait dengan hal tersebut, kalau kita tarik benang merah dari dua pola pendekatan dalam penentuan sasaran di atas, yang dilakukan di Dinas Pendidikan untuk menentukan sasaran-sasaran yang ada dalam mencapai visi misi yang sudah dirumuskan, Dinas Pendidikan cenderung lebih menggunakan pola yang kedua, yaitu dalam penentuan sasaran-sasaran pendidikan, tidak hanya dilakukan oleh pucuk pimpinan, tapi juga ada peran aktif pejabat di bawahnya. Dan rumusan sasaran- sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan dengan tetap berpijak pada RPJMD periode 2016-2021 adalah:

1. Misi Pertama:

Mewujudkan Akses pendidikan yang merata dan berkualitas.

Tujuan:

Meningkatkan Akses dan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan disemua jenjang Satuan Pendidikan.

Sasaran:

- a. Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Sekolah jenjang PAUD;
- b. Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Sekolah jenjang Pendidikan Dasar;
- c. Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Sekolah jenjang Pendidikan Menengah.

2. Misi Kedua:

Mewujudkan Pembelajaran yang bermutu dan berkarakter.

Tujuannya:



- a. Meningkatkan profesionalisme dan distribusi guru & tenaga kependidikan.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Profesional;
- 2) Meningkatnya Proporsi Guru terhadap Siswa pada setiap jenjang pendidikan.

- b. Meningkatkan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat.

Sasaran:

Menurunnya Penduduk Buta Aksara

3. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Layanan Pendidikan.

Adapun

Tujuannya: Meningkatkan Mutu Manajemen Layanan Pendidikan.

Sasaran:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan

Keterkaitan rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja masing-masing sasaran adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:



Tabel 4.1
Rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja masing-masing sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Capaian 2015	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE:					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Akses dan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan disemua jenjang Satuan Pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Sekolah jenjang PAUD	APK PAUD Usia 4-6 Tahun	24,30	31,083	37,867	44,65	51,433	58,217	65,00
			APM PAUD Usia 4-6 Tahun							
			APS PAUD Usia 4-6 Tahun							
		Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Sekolah jenjang Pendidikan Dasar	APK SD/MI	109,80	110,20	110,50	110,90	111,20	111,60	112,00
			APM SD/MI	85,97	86,00	86,15	86,25	86,30	86,40	86,50
			APS SD/MI	108,43	109,00	109,20	109,40	109,60	109,80	110,00
			APK SMP/MTs	111,38	111,95	112,60	113,10	113,75	114,40	115,00
			APM SMP/MTs	62,98	64,75	66,50	68,30	70,00	71,95	73,72
			APS SMP/MTs	80,47	81,00	82,00	82,75	83,50	84,25	85,00
			APuS SD/MI							
			APuS SMP/MTs							
			AM SD ke SMP 100%	118,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			AM SMP ke SMA minimal 70%	62,33	66,50	70,75	75,00	79,50	83,75	88,00
			Angka Kelulusan SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Angka Kelulusan SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Sekolah jenjang Pendidikan Menengah	APK SMA/SMK/MA	73,84	75,23	76,62	78,01	79,40	80,79	82,18
			APM SMA/SMK/MA	65,11	65,93	66,74	67,56	68,37	69,19	70,00
			APS SMA/SMK/MA	76,27	76,50	77,50	78,00	78,75	79,25	80,00
			APuS SMA/SMK/MA							
			Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	99,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatkan profesionalisme dan distribusi guru & tenaga kependidikan	Meningkatnya Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Profesional	Persentase Guru berkualifikasi S1/D4	71,95	74,96	77,97	80,98	83,98	86,99	90,00
			Persentase Guru Profesional (S1/D4 dan bersertifikasi)							
			Persentase Kepala Sekolah Profesional (Berkualifikasi S1/D4, bersertifikasi dan memiliki NUKS)							
			Persentase Pengawas Profesional (Berkualifikasi S1/D4, bersertifikasi dan memiliki NUPS)							



		Meningkatnya Proporsi Guru terhadap Siswa pada setiap jenjang pendidikan	Rasio Guru dan Siswa SD (1:20)	1:28	1:27	1:25	1:24	1:23	1:21	1:20
			Rasio Guru dan Siswa SMP (1:20)	1:27	1:26	1:24	1:23	1:22	1:21	1:20
			Rasio Guru dan Siswa SMA/SMK (1:20)	1:29	1:28	1:27	1:25	1:23	1:21	1:20
3	Meningkatkan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat	Menurunnya Penduduk Buta Aksara	Angka Melek Huruf	95,27	95,30	95,35	95,40	95,42	95,46	95,50
			Angka Rata-rata lama sekolah	7,56	7,60	7,70	7,75	7,85	7,90	8
4	Meningkatkan Mutu Manajemen Layanan Pendidikan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	IKM							
			Kualifikasi LAKIP	CC	CC	B	B	B	B	B



4.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan secara komprehensif tentang upaya SKPD ini (Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara) mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi SKPD ini secara berkelanjutan. Oleh karena itu inti dari uraian strategi ini adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalisasikan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program.

Selanjutnya Arah kebijakan memuat langkah-langkah untuk merumuskan program-program indikatif dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Implementasi dari strategi dan arah kebijakan akan ditempuh dengan:

1. Membangun koordinasi dan kerjasama lintas SKPD, lintas Pemerintahan dan lintas stakeholders lainnya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan;
2. Mengembangkan sistem pendataan/informasi/data statistik;
3. Melaksanakan dan mengikutsertakan aparat pada diklat kepemimpinan dan teknis fungsional;
4. Melaksanakan kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan.

Gambaran keterkaitan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan adalah:



Tabel 4.2:
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1: Mewujudkan Akses pendidikan yang merata dan berkualitas				
1	Meningkatkan Akses dan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan disemua jenjang Satuan Pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Sekolah jenjang PAUD	Peningkatan akses dan layanan PAUD di setiap desa	Sejumlah minimal 12 kecamatan memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif
		Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Sekolah jenjang Pendidikan Dasar	Peningkatan akses dan layanan Pendidikan Dasar	Sejumlah minimal 166 Desa dan 7 Kelurahan memiliki lembaga PAUD
				Pembangunan SMP Unggulan
				Pengembangan SMP Satu Atap pada Daerah 3T
				Meningkatkan Akses Sarana dan Prasarana Pendidikan
		Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Sekolah jenjang Pendidikan Menengah	Penguatan Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten terkait Pendidikan Menengah	Meningkatkan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan
Misi 2: Mewujudkan Pembelajaran yang bermutu dan berkarakter				
2	Meningkatkan profesionalisme dan distribusi guru & tenaga kependidikan	Meningkatnya Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Profesional	Peningkatan Kompetensi Guru melalui penguasaan IPTEK	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatnya Proporsi Guru terhadap Siswa pada setiap jenjang pendidikan	Penguatan Regulasi terkait Distribusi Guru Proporsional melalui Peraturan Daerah	Distribusi Guru Proporsional untuk mengurangi ketimpangan SPM
3	Meningkatkan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat	Menurunnya Penduduk Buta Aksara	Peningkatan Akses melalui Pendidikan Non Formal, Lembaga Kursus dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan



Misi 3: Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Layanan Pendidikan				
4	Meningkatkan Mutu Manajemen Layanan Pendidikan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	Melaksanakan anggaran berbasis kinerja secara konsisten	Meningkatnya Mutu Manajemen Layanan Pendidikan pada seluruh Jenjang Pendidikan



BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus, secara umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan. Sedangkan definisi program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Ada tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu: (1) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan; (2) Terjadi dalam waktu yang relatif lama-bukan kegiatan tunggal tetapi jamak-berkesinambungan; (3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang manager menyusun sebuah perencanaan tersebut.

Dari definisi tersebut di atas, dalam pengertian lain program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga/ masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021, program dan kegiatan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Program/Kegiatan Utama dan Program/Kegiatan Penunjang. Program/kegiatan utama adalah sekumpulan rencana kerja yang berdampak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Sedangkan program/kegiatan penunjang adalah sekumpulan rencana kerja yang memberikan dampak secara tidak langsung terhadap capaian indikator



sasaran. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran dan Program/Kegiatan
Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN
T1	Meningkatkan Akses dan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan disemua jenjang Satuan Pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Sekolah jenjang PAUD	Program Pendidikan Anak Usia Dini
			Pembangunan gedung sekolah
			Penambahan ruang kelas sekolah
			Penambahan ruang guru sekolah
			Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
			Pembangunan unit kesehatan Sekolah
			Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
			Pengadaan Alat Peraga Siswa
			Pengadaan Meubelair Sekolah
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Swasta
		Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Sekolah jenjang Pendidikan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
			Pembangunan Gedung sekolah
			Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
			Penambahan ruang kelas sekolah
			Penambahan ruang guru sekolah
			Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
			Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
			Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
			Pembangunan pepustakaan sekolah
			Pengadaan Sarana Air Berish dan Sanitasi
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
			Pengadaan mebeluer sekolah



			Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
			Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah
			Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Swasta
			Pembangunan SMPN Unggulan
		Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Sekolah jenjang Pendidikan Menengah	Program Pendidikan Menengah
			Pembangunan gedung sekolah
			Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
			Penambahan ruang kelas sekolah
			Penambahan ruang guru sekolah
			Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
			Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
			Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah
			Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
			Pengadaan mebeluer sekolah
			Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Swasta
			Pembangunan SMAN Unggulan
T2	Meningkatkan profesionalisme dan distribusi guru & tenaga kependidikan	Meningkatnya Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Profesional	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi



			Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
			Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
			Pembinaan pusat pelatihan dan pendidikan guru (PPPG)
			Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
			Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
			Pelatihan/Diklat PCKS (NUKS) bagi Calon Kepala Sekolah
			Diklat Kepengawasan (NUPS) bagi Pengawas Sekolah
			Diklat Peningkatan Kompetensi Pengawas
			Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
			Pelatihan Pembina UKS bagi guru TK
			Pelatihan Pembina UKS bagi guru SD
			Pelatihan Pembina UKS bagi Guru SMP
			Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
			Uji Kompetensi Guru
			Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
			Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
			Seleksi guru berprestasi di tingkat Kabupaten bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
			Seleksi Pengawas Sekolah bagi Guru dan Kepala Sekolah
			Seleksi Tenaga Kependidikan berprestasi di tingkat Kabupaten
			Inhouse Training PNS yang dapat diangkat menjadi Calon Guru
			Pengembangan Kelas Inspirasi melalui Traveling and Teaching
			Program Pendidikan Anak Usia Dini
			Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
			pelatihan Kurikulum jenjang PAUD



			pelatihan Pembelajaran Berbasis TIK jenjang PAUD
			Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
			Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
			Workshop Penelitian Tindakan Kelas bagi Guru SD/SMP
			Workshop Pengembangan Diri bagi Guru SD/SMP
			Bimtek Penyusunan Buku Kurikulum bagi Guru SD/SMP
			Bimtek Penilaian Guru SD/SMP
			Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Guru SD/SMP
			Diklat Pengembangan dan Pengelolaan KKG/MGMP/MKKS/MKOS bagi Guru SD/SMP
			Diklat Penilaian Kinerja Guru (PKG) bagi Guru SD/SMP
			Workshop Penyusunan Angka Kredit Guru (PAK) bagi Guru SD/SMP
			Pelatihan Pembelajaran Berbasis TIK Guru SD/SMP
			Diklat Guru Pembelajar bagi Guru SD/SMP
			Diklat Pengembangan Karya Tulis Ilmiah bagi Guru SD/SMP
			Diklat Manajemen Berbasis Sekolah bagi Kepala Sekolah SD/SMP
			Diklat Induksi Guru Pemula bagi Guru SD/SMP
			Pelatihan Penyusunan kurikulum
			Program Pendidikan Menengah
			Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
			Workshop Penelitian Tindakan Kelas
			Workshop Pengembangan Diri bagi PTK
			Bimtek Penyusunan Buku Kurikulum bagi PTK
			Bimtek Penilaian bagi PTK
			Workshop Peningkatan Kompetensi Guru bagi PTK



			Diklat Pengembangan dan Pengelolaan KKG/MGMP/MKKS/MKOS bagi PTK
			Diklat Penilaian Kinerja Guru (PKG) bagi PTK
			Workshop Penyusunan Angka Kredit Guru (PAK) bagi PTK
			Pelatihan Pembelajaran Berbasis TIK bagi PTK
			Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi PTK
			Diklat Pengembangan Karya Tulis Ilmiah bagi PTK
			Diklat Manajemen Berbasis Sekolah bagi Kepala Sekolah
			Diklat Induksi Guru Pemula bagi PTK
			Pelatihan Penyusunan kurikulum berbasis Potensi Lokal (pendidikan vokasional)
		Meningkatnya Proporsi Guru terhadap Siswa pada setiap jenjang pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Distribusi Guru Proporsional
T3	Meningkatkan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Rata-rata lama sekolah	Program Pendidikan Non Formal
			Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
			Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
			Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
			Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
			Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
			Pelatihan Tutor Paket A
			Pelatihan Tutor Paket B
			Pelatihan Tutor Paket C
			Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non format
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
			Penyelenggaraan Paket B Setara SMP



			Program Pendidikan Menengah
			Penyelenggaraan Paket C Setara SMA
T4	Meningkatkan Mutu Manajemen Layanan Pendidikan	Meningkatnya Mutu Manajemen Layanan Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini
			Pengadaan perlengkapan sekolah
			Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
			Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
			Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini
			Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
			Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang PAUD/DIKMAS
			Program Parenting bagi peserta didik PAUD
			Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Sabbang Kab. Luwu Utara
			Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Baebunta Kab. Luwu Utara
			Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Masamba Kab. Luwu Utara
			Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Mappedeceng Kab. Luwu Utara
			Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Malangke Kab. Luwu Utara
			Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Seko Kab. Luwu Utara
			Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Sukamaju Kab. Luwu Utara
			Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Bone-Bone Kab. Luwu Utara



			Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Malangke Barat Kab. Luwu Utara
			Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Rampi Kab. Luwu Utara
			Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Rongkong Kab. Luwu Utara
			Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Tana Lili Kab. Luwu Utara
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Swasta
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
			Pengadaan perlengkapan sekolah
			Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
			Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/Mi/SDLB dan SMP/MTs
			Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
			Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
			Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan metode pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
			Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
			Penyelenggaraan Multi Grade Teaching di Daerah Terpencil
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan
			Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat SD/MI
			Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs
			Pelayanan Pendidikan Gratis



			Suervisi dan Pemantauan SD/SMP
			Program Pendidikan Menengah
			Pengadaan perlengkapan sekolah
			Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
			Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
			Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan
			Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat SMA/SMK/MA
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
			Supervisi dan Pemantauan SMA/SMK
			Lomba Keterampilan Sekolah Tingkat SMA Sederajat
			Pelayanan Pendidikan Gratis Tingkat SMA/SMK/MA
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
			Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
			Pembinaan Dewan Pendidikan
			Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
			Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan
			Lomba UKS Tingkat TK, SD, SMP dan SMA Tingkat Kabupaten
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
			Program Pelayanan Administrasi Kedinasan Pada Cabang Dinas / UPTD Disdik
			Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Disdik Sabbang



			Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Disdik Baebunta
			Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Disdik Limbong
			Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Disdik Seko
			Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Disdik Masamba
			Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Disdik Mappedeceng
			Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Disdik Malangke
			Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Disdik Malangke Barat
			Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Disdik Sukamaju
			Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Disdik Rampi
			Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Disdik Tanalili
			Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Disdik Bone-Bone
			Program Pendidikan Kedinasan
			Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Penyediaan jasa surat menyurat
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			Penyediaan jasa kebersihan kantor
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
			Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Pengadaan Kendaraan dinas/operasional



			Pengadaan peralatan gedung kantor
			Pengadaan mebeleur
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
			Program Pelayanan Kedinasan
			Kunjungan Kerja Bersama Bupati/ Wakil Bupati /DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah tingkat atas/ unit kerja terkait

INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KET			
								TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD					
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
T1	Meningkatkan Akses dan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan di semua jenjang Satuan Pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Sekolah jenjang PAUD		1.01.01	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rasio Ketersediaan RKB dan Murid PAUD maksimal 1:15	01:17														
			APK PAUD Usia 4-6 Tahun			15	01	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah USB TK yang dibangun	11	- USB	-	1 USB	450,000,000	- USB	-	- USB	-	- USB	-	12 USB	450,000,000	TK Pembina
			APM PAUD Usia 4-6 Tahun			15	03	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas Belajar TK yang dibangun	309	- RKB	-	6 RKB	720,000,000	6 RKB	720,000,000	6 RKB	720,000,000	4 RKB	480,000,000	331 RKB	2,640,000,000	
			APS PAUD Usia 4-6 Tahun			15	04	Penambahan ruang guru sekolah	Jumlah Ruang Guru TK yang dibangun	-	- Unit	-	- Unit	-	1 Unit	120,000,000	1 Unit	120,000,000	1 Unit	120,000,000	3 Unit	360,000,000	
						15	09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah Pagar TK Pembina yang dibangun	-	1 Sekolah	58,500,000	- Sekolah	-	- Sekolah	-	- Sekolah	-	- Sekolah	-	- Sekolah	58,500,000	
						15	11	Pembangunan unit kesehatan Sekolah	Jumlah ruangan Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	-	- Unit	-	- Unit	-	1 Unit	120,000,000	- Unit	-	1 Unit	120,000,000	2 Unit	240,000,000	
						15	14	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	Jumlah WC dan sarana air bersih yang dhangun	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	2 Unit	140,000,000	2 Unit	240,000,000	4 Unit	380,000,000	
						15	18	Pengadaan Alat Peraga Siswa	Jumlah Alat Peraga Dalam dan Alat Peraga Luar Kelas yang diadakan	12	- Sekolah	3 Sekolah	450,000,000	3 Sekolah	450,000,000	3 Sekolah	450,000,000	3 Sekolah	450,000,000	24 Sekolah	1,800,000,000		
						15	19	Pengadaan Meubelair Sekolah	Jumlah Meubelair Sekolah yang diadakan	-	- Paket	-	5 Paket	75,000,000	5 Paket	75,000,000	5 Paket	75,000,000	5 Paket	75,000,000	15 Paket	225,000,000	
						15	87	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Swasta	Jumlah Sarana Prasarana Sekolah Swasta yang dibangun/diadakan yang diserahkan kepada Pihak Ketiga	28	- RKB	3 RKB	360,000,000	3 RKB	360,000,000	3 RKB	360,000,000	3 RKB	360,000,000	40 RKB	1,440,000,000		
								Jumlah Unit Sekolah Baru yang dibangun	162	- USB	-	10 USB	4,500,000,000	10 USB	4,500,000,000	10 USB	4,500,000,000	10 USB	4,500,000,000	202 USB	18,000,000,000	Program 1 Desa 1 PAUD	
		Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Sekolah jenjang Pendidikan Dasar	Harapan Lama Sekolah (HLS)	1.01.01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio Ketersediaan RKB dan Siswa SD/SMP maksimal 1:32	SD 1:24 SMP 1:31														
			APK SD/MI			16	01	Pembangunan Gedung sekolah	Jumlah Unit Sekolah Baru yang dibangun	316	- Sekolah	-	3 Sekolah	1,620,000,000	4 Sekolah	2,160,000,000	3 Sekolah	1,620,000,000	4 Sekolah	2,160,000,000	330 Sekolah	7,560,000,000	
			APM SD/MI			16	02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, tenaga sekolah	Jumlah Rumah Dinas Guru yang dibangun	-	1 Unit	163,500,000	4 Unit	660,000,000	5 Unit	825,000,000	5 Unit	825,000,000	4 Unit	660,000,000	19 Unit	3,133,500,000	
			APS SD/MI			16	03	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas Belajar yang dibangun	2,400	- RKB	-	17 RKB	3,060,000,000	17 RKB	3,060,000,000	14 RKB	2,520,000,000	12 RKB	2,160,000,000	2,460 RKB	10,800,000,000	
			APK SMP/MTs			16	04	Penambahan ruang guru sekolah	Jumlah Kantor/Ruang Guru yang dibangun	124	3 Unit	507,100,000	10 Unit	1,500,000,000	10 Unit	1,500,000,000	10 Unit	1,500,000,000	10 Unit	1,500,000,000	167 Unit	6,507,100,000	
			APM SMP/MTs			16	05	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Jumlah Laboratorium yang dibangun	53	- Unit	-	5 Unit	1,000,000,000	6 Unit	1,200,000,000	6 Unit	1,200,000,000	5 Unit	1,000,000,000	75 Unit	4,400,000,000	
			APS SMP/MTs			16	07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga yang dibangun/diadakan	-	- Paket	-	- Paket	-	- Paket	-	- Paket	-	- Paket	-	- Paket	-	
			Angka Putus Sekolah (APuS) SD/MI			16	08	Pembangunan ruang Serbaguna/Aula	Jumlah Ruang Serbaguna/Aula yang dibangun	-	- Paket	-	- Paket	-	- Paket	-	- Paket	-	- Paket	-	- Paket	-	
			Angka Melanjutkan SD ke SMP 100%			16	09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah Pagar Sekolah/Tahud dan Halaman Sekolah yang dibangun/ditata	-	59 Paket	3,612,180,000	16 Paket	1,200,000,000	20 Paket	1,500,000,000	16 Paket	1,200,000,000	20 Paket	1,500,000,000	131 Paket	9,012,180,000	
			Angka Putus Sekolah (APuS) SMP/MTs			16	10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah Ruang UKS yang dibangun	67	1 Unit	87,000,000	16 Unit	1,920,000,000	16 Unit	1,920,000,000	16 Unit	1,920,000,000	18 Unit	2,160,000,000	134 Unit	8,007,000,000	Sekolah Pembina Layak Anak
			Angka Melanjutkan SMP ke SMA minimal 70%			16	11	Pembangunan ruang ibadah	Jumlah Ibadah yang dibangun	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	
						16	12	Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan yang dibangun	192	1 Unit	163,500,000	24 Unit	3,600,000,000	16 Unit	2,400,000,000	24 Unit	3,600,000,000	16 Unit	2,400,000,000	273 Unit	12,163,500,000	
						16	14	Pengadaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	Jumlah Sarana Air bersih dan Sanitasi yang dibangun	725	16 Unit	1,240,000,000	31 Unit	2,170,000,000	23 Unit	1,610,000,000	23 Unit	1,610,000,000	27 Unit	1,890,000,000	845 Unit	8,520,000,000	Menuju Sekolah Layak Anak
						16	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Alat Peraga Matematika SD yang diadakan	-	5 Paket	63,850,000	25 Paket	260,750,000	30 Paket	312,900,000	25 Paket	260,750,000	30 Paket	312,900,000	115 Paket	1,211,150,000	
								Jumlah Alat Peraga IPA SD yang diadakan	-	23 Paket	120,980,000	25 Paket	221,250,000	30 Paket	265,500,000	25 Paket	221,250,000	30 Paket	265,500,000	133 Paket	1,094,480,000		
								Jumlah Alat Peraga IPS SD yang diadakan	-	- Paket	-	25 Paket	160,000,000	30 Paket	192,000,000	25 Paket	160,000,000	30 Paket	192,000,000	110 Paket	704,000,000		
								Jumlah Alat Peraga SBK SD yang diadakan	-	- Paket	-	25 Paket	93,750,000	30 Paket	112,500,000	25 Paket	93,750,000	30 Paket	112,500,000	110 Paket	412,500,000		
								Jumlah Alat Peraga Penjasorkes SD yang diadakan	-	- Paket	-	25 Paket	367,500,000	30 Paket	441,000,000	25 Paket	367,500,000	30 Paket	441,000,000	110 Paket	1,617,000,000		
								Jumlah Alat Peraga Bahasa SD yang diadakan	-	9 Paket	68,400,000	25 Paket	281,000,000	30 Paket	337,200,000	25 Paket	281,000,000	30 Paket	337,200,000	119 Paket	1,304,800,000		
								Jumlah Alat Peraga Matematika SMP yang diadakan	-	- Paket	-	10 Paket	60,000,000	15 Paket	90,000,000	10 Paket	60,000,000	15 Paket	90,000,000	50 Paket	300,000,000		
								Jumlah Alat Laboratorium IPA SMP yang diadakan	-	- Paket	-	10 Paket	500,000,000	15 Paket	750,000,000	10 Paket	500,000,000	15 Paket	750,000,000	50 Paket	2,500,000,000		
								Jumlah Alat Peraga IPS SMP yang diadakan	-	- Paket	-	10 Paket	90,000,000	15 Paket	135,000,000	10 Paket	90,000,000	15 Paket	135,000,000	50 Paket	450,000,000		
								Jumlah Alat Peraga Kesenian SMP yang diadakan	-	- Paket	-	10 Paket	200,000,000	15 Paket	300,000,000	10 Paket	200,000,000	15 Paket	300,000,000	50 Paket	1,000,000,000		
								Jumlah Alat Peraga Penjasorkes SMP yang diadakan	-	- Paket	-	10 Paket	200,000,000	15 Paket	300,000,000	10 Paket	200,000,000	15 Paket	300,000,000	50 Paket	1,000,000,000		
								Jumlah Alat Laboratorium Bahasa/Komputer SMP yang diadakan	-	- Paket	-	5 Paket	750,000,000	7 Paket	1,050,000,000	5 Paket	750,000,000	7 Paket	1,050,000,000	24 Paket	3,600,000,000		
						16	19	Pengadaan mebelur sekolah	Jumlah Meubelair Siswa yang diadakan	-	1 Paket	61,800,000	70 Paket	1,680,000,000	60 Paket	1,440,000,000	60 Paket	1,440,000,000	60 Paket	1,440,000,000	251 Paket	6,061,800,000	
						16	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah Buku-Buku yang diadakan	-	6 Exemplar	500,000,000	4 Exemplar	350,000,000	4 Exemplar	250,000,000	4 Exemplar	450,000,000	4 Exemplar	200,000,000	22 Exemplar	1,750,000,000	
						16	44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas Belajar yang direhab sekolah	2,400	3 RKB	533,000,000	131 RKB	11,790,000,000	136 RKB	12,240,000,000	137 RKB	12,330,000,000	131 RKB	11,790,000,000	2,938 RKB	48,683,000,000	
						16	45	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah yang direhab	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah yang direhab	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	
						16	51	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang direhab	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang direhab	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	
						16	89	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Swasta	Jumlah Sarana Prasarana Sekolah Swasta yang dibangun/diadakan yang diserahkan kepada Pihak Ketiga	-	2	185,000,000	17	-	17	-	13	-	13	-	62	185,000,000	
						16	90	Pembangunan SMPN Unggulan	Jumlah Sarana Prasarana SMPN Unggulan yang dibangun	-	-	-	1 Unit	100,000,000	6 Unit	2,700,000,000	5 Unit	2,250,000,000	3 Unit	2,700,000,000	15 Unit	7,750,000,000	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KET								
								TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD										
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.									
		Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Sekolah jenjang Pendidikan Menengah		1.01.01	17		Program Pendidikan Menengah	Rasio Ketersediaan RKB dan Murid SMA/SMK	01:39										0		-							
			APK SMA/SMK/MA			17	01	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah Unit Sekolah Baru yang dibangun	29	-	USB	-								29	USB	-					
			APM SMA/SMK/MA			17	02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, tenaga sekolah	Jumlah Rumah Dinas Guru yang dibangun			Unit										Unit						
			APS SMA/SMK/MA			17	03	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas Belajar yang dibangun	374	1	RKB	219,800,000								375	RKB	219,800,000					
						17	04	Penambahan ruang guru sekolah	Jumlah Kantor/Ruang Guru yang dibangun		1	Unit	163,500,000								1	Unit	163,500,000					
						17	05	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Jumlah Laboratorium yang dibangun			Unit										Unit						
						17	09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah Pagar yang dibangun	29	7	Sekolah	550,635,000								36	Sekolah	550,635,000					
						17	10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah Ruang UKS yang dibangun			Unit	550,635,000								-	Unit	550,635,000					
						17	12	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan yang dibangun			Unit									-	Unit	-					
						17	14	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	Jumlah Sarana Air bersih dan Sanitasi yang dibangun			Unit									-	Unit	-					
						17	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Peralatan Pendidikan Matematika		-	Paket	-								-	Paket	-					
									Jumlah Peralatan Pendidikan IPA		-	Paket	-								-	Paket	-					
									Jumlah Peralatan Pendidikan IPS		-	Paket	-								-	Paket	-					
									Jumlah Peralatan Pendidikan Bahasa		-	Paket	-								-	Paket	-					
									Jumlah Peralatan Pendidikan Penjasorkes		-	Paket	-								-	Paket	-					
									Jumlah Peralatan Pendidikan Seni budaya		-	Paket	-								-	Paket	-					
									Jumlah Peralatan Pendidikan Keterampilan		-	Paket	-								-	Paket	-					
									Jumlah Peralatan Pendidikan TIK		-	Paket	-								-	Paket	-					
									Jumlah Peralatan Pendidikan Kejuruan TKJ		-	Paket	-								-	Paket	-					
									Jumlah Peralatan Pendidikan Kejuruan RPL		-	Paket	-								-	Paket	-					
									Jumlah Peralatan Pendidikan Kejuruan Elektro		-	Paket	-								-	Paket	-					
									Jumlah Peralatan Pendidikan Kejuruan TAV		-	Paket	-								-	Paket	-					
									Jumlah Peralatan Pendidikan Kejuruan Mesin		-	Paket	-								-	Paket	-					
									Jumlah Peralatan Pendidikan Kejuruan Sipil		-	Paket	-								-	Paket	-					
									Jumlah Peralatan Pendidikan Kejuruan Pertanian		-	Paket	-								-	Paket	-					
									Jumlah Peralatan Pendidikan Kejuruan Perikanan		-	Paket	-								-	Paket	-					
									Jumlah Peralatan Pendidikan Kejuruan TKR		-	Paket	-								-	Paket	-					
									Jumlah Peralatan Pendidikan Kejuruan Otomotif		-	Paket	-								-	Paket	-					
									Jumlah Alat Laboratorium Fisika		-	Paket	-								-	Paket	-					
									Jumlah Alat Laboratorium Kimia		-	Paket	-								-	Paket	-					
									Jumlah Alat Laboratorium Biologi		-	Paket	-								-	Paket	-					
									Jumlah Alat Laboratorium Bahasa		-	Paket	-								-	Paket	-					
						17	19	Pengadaan mebelhur sekolah	Jumlah Meja Siswa yang diadakan			Unit									-	Unit	-					
									Jumlah Kursi Siswa yang diadakan			Unit										Unit						
									Jumlah Meja Guru yang diadakan			Unit										Unit						
									Jumlah Kursi Guru yang diadakan			Unit										Unit						
									Jumlah Papan Tulis yang diadakan			Unit										Unit						
						17	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah Buku-Buku yang diadakan			Exemplar									-	Exemplar	-					
						17	44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas Belajar yang direhab		-	RKB	-								-	RKB	-					
						17	89	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Swasta	Jumlah Sarana Prasarana Sekolah Swasta yang dibangun/diadakan yang diserahkan kepada Pihak Ketiga				-								-		-					
						17	90	Pembangunan SMAN Unggulan	Jumlah Sarana Prasarana SMAN Unggulan yang dibangun	-	-	Unit	-								-	Unit	-					
T2	Meningkatkan profesionalisme dan distribusi guru & tenaga kependidikan	Meningkatnya Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Profesional	Persentase Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang Layak	1.01.01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi	45.82%										0		-							
						20	03	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah Guru yang mengikuti Diklat Guru Pembelajar	-	-	Orang	42,000,000	200	Orang	350,000,000	200	Orang	350,000,000	200	Orang	350,000,000	800	Orang	1,442,000,000			
						20	04	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Jumlah KKG yang dibina																			
						20	05	Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Jumlah MGMP yang dibina																			
						20	06	Pembinaan pusat pelatihan dan pendidikan guru (PPPG)	Jumlah kelompok PPPG SD dan SMP yang dibina																			
						20	07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pendidikan lanjutan																			
						20	11	Pengembangan sistem perencanaan dan penyelenggaraan program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Calon Kepala Sekolah yang mengikuti Pelatihan/Diklat PKKS (NUKS)	-	-	Orang	-	200	Orang	1,600,000,000	50	Orang	400,000,000	100	Orang	800,000,000	100	Orang	800,000,000	450	Orang	3,600,000,000
									Jumlah Pengawas Sekolah yang mengikuti Diklat Kepengawasan (NUPS)		-	Orang	-	40	Orang	320,000,000	40	Orang	320,000,000	20	Orang	160,000,000	-	Orang	-	100	Orang	800,000,000
									Jumlah Pengawas Sekolah yang mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi Pengawas		-	Orang	-	40	Orang	320,000,000	40	Orang	320,000,000	20	Orang	160,000,000	-	Orang	-	100	Orang	800,000,000
						20	08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Guru TK yang Mengikuti Pelatihan Pembina UKS		40	Orang	100,000,000	58	Orang	145,000,000	57	Orang	142,500,000	-	Orang	-	-	Orang	-	155	Orang	387,500,000
									Jumlah Guru SD yang Mengikuti Pelatihan Pembina UKS	69	-	Orang	-	45	Orang	112,500,000	45	Orang	112,500,000	45	Orang	112,500,000	40	Orang	100,000,000	244	Orang	437,500,000
									Jumlah Guru SMP yang Mengikuti Pelatihan Pembina UKS	26	-	Orang	-	-	Orang	-	45	Orang	112,500,000	-	Orang	-	-	Orang	-	71	Orang	112,500,000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KET			
								TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD					
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
				1.01.01	16			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah Warga Belajar yang Lulus Paket B														
					16	68		Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah Kelompok belajar Paket B yang dilatih	30	6 Kelompok	150,000,000	6 Kelompok	150,000,000	6 Kelompok	150,000,000	6 Kelompok	150,000,000	60 Kelompok	750,000,000			
				1.01.01	17			Program Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Belajar yang Lulus Paket C														
					16	68		Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Jumlah Kelompok belajar Paket C yang dilatih		- Kelompok	-							- Kelompok		-		
74	Meningkatkan Mutu Manajemen Layanan Pendidikan	Meningkatnya Mutu Manajemen Layanan Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1.01.01	15			Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah lembaga PAUDNI yang dilayani	154													
					15	20		Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah buku raport dan lisah TK yang diadakan		3,000 Exemplar	47,600,000	3,450 Exemplar	34,500,000	3,968 Exemplar	39,675,000	4,563 Exemplar	45,626,250	5,247 Exemplar	52,470,188	5,247 Exemplar	52,470,188	Rutin
					15	59		Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah lembaga PAUDNI yang diverifikasi	154	154 Lembaga	27,150,000	173 Lembaga	86,500,000	200 Lembaga	100,000,000	240 Lembaga	120,000,000	273 Lembaga	136,500,000	273 Lembaga	136,500,000	Rutin
					15	59		Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya Lomba gugus TK/KB	12	12 Kec.	43,000,000	12 Kec.	49,450,000	12 Kec.	56,867,500	12 Kec.	65,397,625	12 Kec.	75,207,269	12 Kec.	75,207,269	Rutin
					15	60		Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah satuan pendidikan jenjang PAUD yang didata melalui Aplikasi Pendataan PAUD	154	154 Sekolah	65,950,000	173 Sekolah	75,842,500	200 Sekolah	87,218,875	240 Sekolah	100,301,706	273 Sekolah	115,346,962	273 Sekolah	115,346,962	Rutin
					15	66		Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah pengelolaan Subaidi Aneka Tunjangan jenjang PAUDNI yang dimonitoring dan dilaporkan	4	4 Jenis	26,700,000	4 Jenis	30,705,000	4 Jenis	35,310,750	4 Jenis	40,607,363	4 Jenis	46,698,467	4 Jenis	46,698,467	Rutin
					15	67		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah Lomba kreatifitas siswa TK/KB yang dilaksanakan	5	5 Lomba	57,530,000	5 Lomba	66,159,500	5 Lomba	76,083,425	5 Lomba	87,495,939	5 Lomba	100,620,330	5 Lomba	100,620,330	Rutin
					15	68		Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang PAUD/DIKMAS	Jumlah TK/PAUD penerima Bantuan Dana BOP	154	154 Sekolah	1,912,500,000	173 Sekolah	2,162,500,000	200 Sekolah	2,500,000,000	240 Sekolah	3,000,000,000	273 Sekolah	3,412,500,000	273 Sekolah	3,412,500,000	APBN, BOP PAUD
					15	69		Program Parenting bagi peserta didik PAUD	Jumlah TK pelaksana program	-	- Sekolah	-	40 Sekolah	600,000,000	50 Sekolah	750,000,000	50 Sekolah	750,000,000	33 Sekolah	495,000,000	173 Sekolah	2,595,000,000	
					15	70		Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Sabhng Kab. Luwu Utara	Jumlah satuan pendidikan TK pembina yang dilayani	1	1 Sekolah	28,600,000	1 Sekolah	30,030,000	1 Sekolah	31,531,500	1 Sekolah	33,108,075	1 Sekolah	34,763,479	1 Sekolah	34,763,479	Rutin, Operasional TK Pembina
					15	71		Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Baebunta Kab. Luwu Utara	Jumlah satuan pendidikan TK pembina yang dilayani	1	1 Sekolah	28,600,000	1 Sekolah	30,030,000	1 Sekolah	31,531,500	1 Sekolah	33,108,075	1 Sekolah	34,763,479	1 Sekolah	34,763,479	Rutin, Operasional TK Pembina
					15	72		Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Masamba Kab. Luwu Utara	Jumlah satuan pendidikan TK pembina yang dilayani	1	1 Sekolah	25,200,000	1 Sekolah	26,460,000	1 Sekolah	27,783,000	1 Sekolah	29,172,150	1 Sekolah	30,630,758	1 Sekolah	30,630,758	Rutin, Operasional TK Pembina
					15	73		Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Mappedeceng Kab. Luwu Utara	Jumlah satuan pendidikan TK pembina yang dilayani	1	1 Sekolah	28,600,000	1 Sekolah	30,030,000	1 Sekolah	31,531,500	1 Sekolah	33,108,075	1 Sekolah	34,763,479	1 Sekolah	34,763,479	Rutin, Operasional TK Pembina
					15	74		Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Malangke Kab. Luwu Utara	Jumlah satuan pendidikan TK pembina yang dilayani	1	1 Sekolah	28,600,000	1 Sekolah	30,030,000	1 Sekolah	31,531,500	1 Sekolah	33,108,075	1 Sekolah	34,763,479	1 Sekolah	34,763,479	Rutin, Operasional TK Pembina
					15	75		Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Seko Kab. Luwu Utara	Jumlah satuan pendidikan TK pembina yang dilayani	1	1 Sekolah	51,200,000	1 Sekolah	53,760,000	1 Sekolah	56,448,000	1 Sekolah	59,270,400	1 Sekolah	62,233,920	1 Sekolah	62,233,920	Rutin, Operasional TK Pembina
					15	76		Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Sukamaju Kab. Luwu Utara	Jumlah satuan pendidikan TK pembina yang dilayani	1	1 Sekolah	28,600,000	1 Sekolah	30,030,000	1 Sekolah	31,531,500	1 Sekolah	33,108,075	1 Sekolah	34,763,479	1 Sekolah	34,763,479	Rutin, Operasional TK Pembina
					15	77		Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Bone-Bone Kab. Luwu Utara	Jumlah satuan pendidikan TK pembina yang dilayani	1	1 Sekolah	28,600,000	1 Sekolah	30,030,000	1 Sekolah	31,531,500	1 Sekolah	33,108,075	1 Sekolah	34,763,479	1 Sekolah	34,763,479	Rutin, Operasional TK Pembina
					15	78		Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Malangke Barat Kab. Luwu Utara	Jumlah satuan pendidikan TK pembina yang dilayani	1	1 Sekolah	28,600,000	1 Sekolah	30,030,000	1 Sekolah	31,531,500	1 Sekolah	33,108,075	1 Sekolah	34,763,479	1 Sekolah	34,763,479	Rutin, Operasional TK Pembina
					15	79		Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Rumpi Kab. Luwu Utara	Jumlah satuan pendidikan TK pembina yang dilayani	1	1 Sekolah	53,200,000	1 Sekolah	55,860,000	1 Sekolah	58,653,000	1 Sekolah	61,585,650	1 Sekolah	64,664,933	1 Sekolah	64,664,933	Rutin, Operasional TK Pembina
					15	80		Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Rongkong Kab. Luwu Utara	Jumlah satuan pendidikan TK pembina yang dilayani	1	1 Sekolah	38,400,000	1 Sekolah	40,320,000	1 Sekolah	42,336,000	1 Sekolah	44,452,800	1 Sekolah	46,675,440	1 Sekolah	46,675,440	Rutin, Operasional TK Pembina
					15	81		Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Tana Lili Kab. Luwu Utara	Jumlah satuan pendidikan TK pembina yang dilayani	-	- Sekolah	-	1 Sekolah	32,890,000	1 Sekolah	34,534,500	1 Sekolah	36,261,225	1 Sekolah	38,074,286	1 Sekolah	38,074,286	Rutin, Operasional TK Pembina
					15	82		Pengadaan Sarana dan Prasarana SekolahSwasta	Jumlah Pengadaan yang diserahkan kepada pihak ketiga		- Sekolah	-	- Sekolah	-	- Sekolah	-	- Sekolah	-	- Sekolah	-	- Sekolah	-	
				1.01.01	16			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang dilayani	316													
					16	20		Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah buku raport SD,MI dan SMP, MTs yang diadakan	-	12,800 Exemplar	128,000,000	13,440 Exemplar	134,400,000	14,112 Exemplar	141,120,000	14,818 Exemplar	148,176,000	17,040 Exemplar	170,402,400	17,040 Exemplar	170,402,400	Rutin
					16	63		Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Jumlah SD/SMP penerima Bantuan Dana BOS	316	316 Sekolah	33,750,150,000	319 Sekolah	35,437,657,500	323 Sekolah	37,209,540,375	326 Sekolah	39,070,017,394	328 Sekolah	49,386,960,000	328 Sekolah	49,386,960,000	APBN, BOS SD/SMP
					16	66		Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs	Jumlah Sekolah unggulan yang didampingi	-	2 Sekolah	200,000,000	4 Sekolah	400,000,000	7 Sekolah	700,000,000	6 Sekolah	600,000,000	2 Sekolah	200,000,000	21 Sekolah	2,100,000,000	SMP Unggulan
					16	69		Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Sekolah jenjang Pendidikan Dasar yang dilayani melalui dana Gratis dan BOS	316	316 Sekolah	90,015,000	319 Sekolah	94,515,750	323 Sekolah	99,241,538	326 Sekolah	104,203,614	328 Sekolah	114,623,976	328 Sekolah	114,623,976	Rutin
					16	70		Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Jumlah kegiatan pembinaan minat bakat yang diikuti	14	14 Kegiatan	341,400,000	14 Kegiatan	358,470,000	14 Kegiatan	376,393,500	14 Kegiatan	395,213,175	7 Kegiatan	454,495,151	7 Kegiatan	454,495,151	Rutin
					16	72		Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan metode pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	Jumlah Guru yang dilatih metode pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	-	- Orang	-	80 Orang	200,000,000	80 Orang	200,000,000	80 Orang	200,000,000	200 Orang	500,000,000	440 Orang	1,100,000,000	
					16	76		Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang terakreditasi	316	40 Sekolah	75,200,000	40 Sekolah	86,480,000	45 Sekolah	99,452,000	55 Sekolah	114,369,800	65 Sekolah	131,525,270	561 Sekolah	507,027,070	
					16	77		Penyelenggaraan Multi Grade Teaching di Daerah Terpencil	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembelajaran dengan Multi Grade Teaching	-	- Sekolah	-	2 Sekolah	200,000,000	6 Sekolah	600,000,000	6 Sekolah	600,000,000	3 Sekolah	300,000,000	17 Sekolah	1,700,000,000	
					16	78		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pengelolaan subsidi Aneka Tunjangan Guru Bidang Pendidikan Dasar yang dimonitoring dan dilaporkan	8	8 Jenis	56,125,000	8 Jenis	58,931,250	8 Jenis	61,877,813	8 Jenis	64,971,703	4 Jenis	56,125,000	4 Jenis	56,125,000	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KET			
								TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD					
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
					16	79	Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat SD/MI	Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti UAS/UAN	-	6,971 Orang	179,700,000	7,320 Orang	188,685,000	7,686 Orang	198,119,250	8,070 Orang	208,025,213	6,971 Orang	156,200,000	6,971 Orang	156,200,000		
						80	Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs	Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti UAS/UAN	-	6,226 Orang	112,241,000	6,537 Orang	117,853,050	6,864 Orang	123,745,703	7,207 Orang	129,932,988	6,226 Orang	112,241,000	6,226 Orang	112,241,000		
					16	81	Pelayanan Pendidikan Gratis	Jumlah SD/MI SMP/MTs yang mengikuti program Pendidikan Gratis	316	316 Sekolah	15,253,197,800	319 Sekolah	16,015,857,690	323 Sekolah	16,816,650,575	326 Sekolah	17,657,483,103	368 Sekolah	18,925,683,400	368 Sekolah	18,925,683,400		
				1.01.01	16		Supervisi dan Pemantauan SD/SMP	Jumlah sekolah yang dipantau/diawasi	316	316 Sekolah	224,400,000	319 Sekolah	235,620,000	323 Sekolah	247,401,000	326 Sekolah	259,771,050	75 Sekolah	70,000,000	75 Sekolah	70,000,000		
						16	20	Program Pendidikan Menengah yang dilayani	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang dilayani	29													
						16	61	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah buku raport SMA/SMK yang diadakan		6,000 Eksemplar	60,000,000							6,000	60,000,000			
						16		Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	Jumlah SMA/SMK yang dilayani melalui Program BOS										-	-			
						16	64	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Jumlah Sekolah yang dilayani melalui dana Gratis dan BOS		45 Sekolah	63,100,000							45	63,100,000			
						16	70	Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	Jumlah alat peraga/ bahan lomba keterampilan siswa tingkat SMK yang diadakan										-	-			
						16	65	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pengelolaan subsidi Aneka Tunjangan Guru Bidang Pendidikan Menengah yang dimonitoring dan dilaporkan		4 Jenis	40,000,000							4	40,000,000			
						16	68	Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat SMA/SMK/MA	Jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tingkat SMA/SMK/MA		4,364 Siswa	111,575,000							4,364	111,575,000			
						16	69	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang diikuti		9 Lomba	135,699,000							9	135,699,000			
						16	71	Supervisi dan Pemantauan SMA/SMK	Jumlah sekolah yang disupervisi/dipantau		27 Sekolah	37,000,000							27	37,000,000			
						16	72	Lomba Keterampilan Sekolah Tingkat SMA Sederajat	Jumlah bidang lomba keterampilan siswa yang diikuti		4 Lomba	144,000,000							4	144,000,000			
						16	73	Pelayanan Pendidikan Gratis Tingkat SMA/SMK/MA	Jumlah SMA/SMK/MA yang mengikuti Program Pendidikan Gratis		19 Sekolah	6,760,063,700							19	6,760,063,700			
				1.01.01	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang dilayani	499										499	-			
						22	01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan SD/SMP yang dilakukan Evaluasi SPM		315 Sekolah	41,900,000	315 Sekolah	41,900,000	315 Sekolah	41,900,000	315 Sekolah	41,900,000	315 Sekolah	41,900,000	315 Sekolah	41,900,000	
						22	05	Pembinaan Dewan Pendidikan	Jumlah kunjungan dewan pendidikan dalam rangka pembinaan ke sekolah		24 Kali	140,000,000	24 Kali	140,000,000	24 Kali	140,000,000	24 Kali	140,000,000	24 Kali	140,000,000	24 Kali	140,000,000	
						22	07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jumlah pengambilan data DAPODIKAS/DAPODIKEMN Satuan Pendidikan tingkat SD/SMP, SMA/SMK	501	501 Sekolah	114,987,000	501 Sekolah	114,987,000	501 Sekolah	114,987,000	501 Sekolah	114,987,000	501 Sekolah	114,987,000	501 Sekolah	114,987,000	
						22	08	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Jumlah Pengawas yang mengikuti Diklat Kepengawasan		77 Orang	38,350,000	77 Orang	38,350,000	77 Orang	38,350,000	77 Orang	38,350,000	77 Orang	38,350,000	385 Orang	191,750,000	
						22	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan		4 Triwulan	83,000,000	4 Triwulan	83,000,000	4 Triwulan	83,000,000	4 Triwulan	83,000,000	4 Triwulan	83,000,000	4 Triwulan	83,000,000	
						22	10	Lomba UKS Tingkat TK, SD, SMP dan SMA Tingkat Kabupaten	Jumlah Sekolah yang mengikuti Lomba UKS		36 Sekolah	75,400,000	36 Sekolah	75,400,000	36 Sekolah	75,400,000	36 Sekolah	75,400,000	36 Sekolah	75,400,000	36 Sekolah	75,400,000	
				1.01.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Penilaian LAKIP											-	-			
						06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP dan LPID yang dilaporkan	2	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	10,000,000	
				1.01.01	23		Program Pelayanan Administrasi Kedisnasan Pada Cabang Dinas / UPTD Didik	Jumlah UPTD yang di layani	12										12	-			
						23	01	Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Didik Sabbang	Jumlah TK/PAUD; SD/SDLB yang dilayani	42	42 Sekolah	51,000,000	42 Sekolah	53,550,000	42 Sekolah	56,227,500	42 Sekolah	59,038,875	42 Sekolah	61,990,819	42 Sekolah	61,990,819	
						23	02	Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Didik Babuata	Jumlah TK/PAUD; SD/SDLB yang dilayani	63	63 Sekolah	47,500,000	64 Sekolah	49,875,000	65 Sekolah	52,368,750	66 Sekolah	54,987,188	67 Sekolah	57,736,547	67 Sekolah	57,736,547	
						23	03	Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Didik Limbong	Jumlah TK/PAUD; SD/SDLB yang dilayani	11	11 Sekolah	55,000,000	11 Sekolah	57,750,000	11 Sekolah	60,637,500	11 Sekolah	63,669,375	11 Sekolah	66,852,844	11 Sekolah	66,852,844	
						23	04	Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Didik Seko	Jumlah TK/PAUD; SD/SDLB yang dilayani	28	28 Sekolah	73,000,000	28 Sekolah	76,650,000	28 Sekolah	80,482,500	28 Sekolah	84,506,625	28 Sekolah	88,731,956	28 Sekolah	88,731,956	
						23	05	Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Didik Masamba	Jumlah TK/PAUD; SD/SDLB yang dilayani	44	44 Sekolah	49,500,000	44 Sekolah	51,975,000	44 Sekolah	54,573,750	44 Sekolah	57,302,438	44 Sekolah	60,167,559	44 Sekolah	60,167,559	
						23	06	Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Didik Mappedeeng	Jumlah TK/PAUD; SD/SDLB yang dilayani	31	31 Sekolah	51,000,000	31 Sekolah	53,550,000	31 Sekolah	56,227,500	31 Sekolah	59,038,875	31 Sekolah	61,990,819	31 Sekolah	61,990,819	
						23	07	Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Didik Malangke	Jumlah TK/PAUD; SD/SDLB yang dilayani	34	34 Sekolah	51,000,000	34 Sekolah	53,550,000	34 Sekolah	56,227,500	34 Sekolah	59,038,875	34 Sekolah	61,990,819	34 Sekolah	61,990,819	
						23	08	Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Didik Malangke Barat	Jumlah TK/PAUD; SD/SDLB yang dilayani	39	39 Sekolah	49,000,000	39 Sekolah	51,450,000	39 Sekolah	54,022,500	39 Sekolah	56,723,625	39 Sekolah	59,559,806	39 Sekolah	59,559,806	
						23	09	Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Didik Sukamaju	Jumlah TK/PAUD; SD/SDLB yang dilayani	56	56 Sekolah	48,500,000	56 Sekolah	50,925,000	56 Sekolah	53,471,250	56 Sekolah	56,144,813	56 Sekolah	58,952,053	56 Sekolah	58,952,053	
						23	10	Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Didik Rampi	Jumlah TK/PAUD; SD/SDLB yang dilayani	13	13 Sekolah	60,500,000	13 Sekolah	63,525,000	13 Sekolah	66,701,250	13 Sekolah	70,036,313	13 Sekolah	73,538,128	13 Sekolah	73,538,128	
						23	11	Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Didik Tanaili	Jumlah TK/PAUD; SD/SDLB yang dilayani	23	23 Sekolah	58,000,000	23 Sekolah	60,900,000	23 Sekolah	63,945,000	23 Sekolah	67,142,250	23 Sekolah	70,499,363	23 Sekolah	70,499,363	
						23	12	Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Didik Bone-Bone	Jumlah TK/PAUD; SD/SDLB yang dilayani	33	33 Sekolah	58,000,000	34 Sekolah	60,900,000	35 Sekolah	63,945,000	36 Sekolah	67,142,250	37 Sekolah	70,499,363	37 Sekolah	70,499,363	
				1.01.01	30		Program Pendidikan Kedisnasan	Rasio Pejabat yang telah LATPIM											-	-			
						30	01	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Jumlah Pejabat eselon II, III dan IV yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	10	7 Orang	157,500,000	3 Orang	67,500,000	3 Orang	67,500,000	3 Orang	67,500,000	3 Orang	67,500,000	29 Orang	427,500,000	
				1.01.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Publik (=jumlah persentase layanan / total layanan *100)											-	-			
						01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	500	500 Surat	7,500,000	500 Surat	8,625,000	500 Surat	9,918,750	500 Surat	11,406,563	500 Surat	13,117,547	500 Surat	13,117,547	Rutin
						01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi yang disediakan	12	12 Bulan	56,400,000	12 Bulan	64,860,000	12 Bulan	74,589,000	12 Bulan	85,777,350	12 Bulan	98,643,953	12 Bulan	98,643,953	Rutin
						01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	2	2 Orang	28,800,000	2 Orang	33,120,000	2 Orang	38,088,000	2 Orang	43,801,200	2 Orang	50,371,380	2 Orang	50,371,380	Rutin
						01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Alat-Alat Listrik dan Penerangan Kantor yang diadakan	20	20 Jenis	10,500,000	20 Jenis	12,075,000	20 Jenis	13,886,250	20 Jenis	15,969,188	20 Jenis	18,364,566	20 Jenis	18,364,566	Rutin

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KET	
									TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
				01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang di adakan	10	10 Jenis	24,120,000	10 Jenis	27,738,000	10 Jenis	31,898,700	10 Jenis	36,683,505	10 Jenis	42,186,031	10 Jenis	42,186,031	Rutin	
					01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah aparat yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	35	35 Orang	250,000,000	35 Orang	287,500,000	35 Orang	330,625,000	35 Orang	380,218,750	35 Orang	437,251,563	35 Orang	437,251,563	Rutin
					01	19	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset	Jumlah laporan penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan aset pada Dinas Pendidikan	8	8 Dokumen	1,217,000,000	8 Dokumen	1,399,550,000	8 Dokumen	1,609,482,500	8 Dokumen	1,850,904,875	8 Dokumen	2,128,540,606	8 Dokumen	2,128,540,606	Rutin
				1.01.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Asasatur	Persentase Sarana Prasarana yang dielihara											-	-		
					02	05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang diadakan		Unit		12 Unit	180,000,000	18 Unit	270,000,000	18 Unit	270,000,000	18 Unit	270,000,000	66 Unit	990,000,000	Kendaraan Dinas Operasional Pengawas
					02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan		3 Jenis	57,000,000	3 Jenis	57,000,000	3 Jenis	57,000,000	3 Jenis	57,000,000	3 Jenis	57,000,000	15 Jenis	285,000,000	
					02	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubelair kantor yang diadakan		6 Jenis	35,000,000	10 Jenis	350,000,000	8 Jenis	280,000,000	6 Jenis	210,000,000	12 Jenis	210,000,000	42 Jenis	1,085,000,000	
					02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan kantor yang dipelihara		1 Unit	15,000,000	1 Unit	15,000,000	1 Unit	15,000,000	1 Unit	15,000,000	1 Unit	15,000,000	1 Unit	15,000,000	
					02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara		2 Unit	48,000,000	2 Unit	48,000,000	2 Unit	48,000,000	2 Unit	48,000,000	2 Unit	48,000,000	2 Unit	48,000,000	
					02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		6 Jenis	15,000,000	6 Jenis	15,000,000	6 Jenis	15,000,000	6 Jenis	15,000,000	6 Jenis	15,000,000	30 Jenis	75,000,000	
					02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Dinas Pendidikan yang di rehab		1 Unit	163,500,000	2 Unit	327,000,000	1 Unit	163,500,000	- Unit	-	2 Unit	327,000,000	6 Unit	981,000,000	
				1.01.01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Asasatur	Persentase peserta BIMTEK											-	-		
					05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	350	350 Orang	15,000,000	350 Orang	15,000,000	350 Orang	15,000,000	350 Orang	15,000,000	350 Orang	15,000,000	350 Orang	15,000,000	
					05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparat yang mengikuti Bimbingan Teknis	15	15 Orang	84,000,000	15 Orang	84,000,000	15 Orang	84,000,000	15 Orang	84,000,000	15 Orang	84,000,000	15 Orang	84,000,000	
				1.01.01	09		Program Pelayanan Kedinasan	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan											-	-		
					09	01	Kunjungan Kerja Bersama Bupati/ Wakil Bupati / DPRD/ Muspida/ Pejabat Pemerintah tingkat atas/ unit kerja terkait	Jumlah kunjungan kerja yang diikuti	12	12 Bulan	58,200,000	12 Bulan	58,200,000	12 Bulan	58,200,000	12 Bulan	58,200,000	12 Bulan	58,200,000	12 Bulan	58,200,000	
JUMLAH										74,155,983,500		111,422,322,240		117,131,886,502		118,864,591,502		130,334,538,709		306,853,558,209		



BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam setiap organisasi perlu adanya arah yang jelas, arah dimaksud dalam organisasi adalah organisasi menerapkan pola penetapan indikator kinerja melalui pernyataan Visi, pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada tahap paling awal kita perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja yang akan dibutuhkan. Adapun definisi indikator kinerja itu sendiri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BPKP (2000) adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. indikator kinerja tidak hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada level sasaran strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indikator kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur secara langsung.

Terkait dengan hal tersebut, maka peran pendidikan dalam pembangunan sangatlah penting. untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja. Rumusan indikator kinerja yang digunakan pada sektor pendidikan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: *pertama* Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; *Kedua* Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Pada tabel bawah ini adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tabel 6.1: Target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Periode 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2015	Capaian Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	Tahun	7,56	7,60	7,70	7,75	7,85	7,90	8,00
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	Persen	108,43	109,00	109,20	109,40	109,60	109,60	110,00
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	80,47	81,00	82,00	82,75	83,50	84,25	85,00
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Persen							
5	Angka Kelulusan SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Angka Kelulusan SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	Persen	99,27	100	100	100	100	100	100
8	Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	110,33	110,33	110,33	110,33	110,33	110,33	110,33
9	Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	62,33	66,50	70,75	75,00	79,50	83,75	88,00
10	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	Persen	45,82	48,00	50,55	52,50	55,00	57,50	60,00
11	Angka Melek Huruf	Persen	98,82	98,85	98,90	98,95	98,95	98,97	99,00
12	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Persen	7,29	7,40	7,53	7,68	7,68	8,04	8,26
13	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	Persen	115,02	110,20	110,50	110,90	111,20	111,60	112,00
14	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	Persen	83,39	111,95	112,60	113,10	113,75	114,40	115,00
15	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	81,93	75,23	76,62	76,01	79,40	80,79	82,18
16	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	Persen	71,84	93,85	93,90	94,10	94,50	94,80	95,0
18	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	63,31	72	74	76	78	80	82
19	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	Rasio	1:24	1:24	1:23	1:23	1:22	1:21	1:20
20	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	Rasio	1:31	1:31	1:31	1:30	1:30	1:30	1:30
21	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA	Rasio	1:39	1:38	1:36	1:35	1:34	1:33	1:32
22	Rasio Guru/murid SD/MI	Rasio	1:28	1:27	1:25	1:24	1:23	1:21	1:20
23	Rasio Guru/siswa SMP/MTs	Rasio	1:27	1:26	1:24	1:23	1:22	1:21	1:20
24	Rasio Guru/siswa SMA/SMK/MA	Rasio	1:29	1:28	1:27	1:25	1:23	1:21	1:20
25	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	95,67	95,30	95,35	95,40	95,42	95,46	95,50



BAB VII PENUTUP

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pendidikan. Pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pendidikan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara *substansial* merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Ditetapkan di : Masamba
Tanggal : 23 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Drs. JASRUM, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19631231 199703 1 023